



Laporan Kinerja LPSPS Sorong Triwulan II Tahun 2025

Kementerian Kelautan dan Perikanan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong

MEMBANGUN ZONA
INTEGRITAS WBK WBBM

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong. Laporan Kinerja (LKj) LPSPL Sorong Triwulan II Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kontrak kinerja yang telah disepakati. Pada LKj Triwulan II Tahun 2025 kami sampaikan capaian indikator kinerja pada Triwulan II Tahun 2025, perbandingan capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 dengan Triwulan II Tahun 2025, analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis keberhasilan, kegagalan dan solusi, kegiatan pendukung, rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan II tahun 2025, dan realisasi anggaran yang terserap pada triwulan II Tahun 2025. Laporan ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan program/kegiatan LPSPL Sorong triwulan II tahun 2025.



Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk secara bersama-sama berupaya mencapai target kinerja sesuai yang telah disepakati pada triwulan II tahun 2025 ini. Semoga LKj ini dapat menjadi salah satu masukan bagi organisasi yang lebih luas sebagai upaya perbaikan demi kemajuan pengelolaan kelautan dan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta pelaporan ini, karenanya kami mohon maaf dan masukan serta kritik maupun evaluasi yang membangun akan kami terima dengan senang hati sebagai perbaikan di masa mendatang.

Sorong, 18 Juli 2025

Plt. Kepala LPSPL Sorong



Ditandatangani
Secara Elektronik

Hendrik Sombo, S.Pi., M.Si.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di Kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun secara periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (disclosure) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Hasil capaian kinerja yang dituangkan pada LKj Triwulan II Tahun 2025 ini telah mendukung pelaksanaan rencana strategis DJPKRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan kinerja (LKj) LPSPL Sorong Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggung jawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan LPSPL Sorong dalam jangka waktu 1 (satu) triwulan dari Bulan April sampai Bulan Juni 2025. Pada pelaporan LKj Triwulan II Tahun 2025 data capaian dan target LPSPL Sorong telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan dalam folder bit.ly/SAKIPDJPK2025 serta sesuai dengan format Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen KP No. 35/PERMEN-KP/2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan KKP. Pada tahun triwulan II tahun 2025 LPSPL Sorong memiliki target 17 Indikator Kinerja (IK), dengan rincian :

1. LPSPL Sorong mempunyai 3 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target kinerja diantaranya:
 - a. IK 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong tercapai 84,62 dari target 78 dengan persentase kinerjaku 108,49%;
 - b. IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong tercapai 100% dari target 95% dengan persentase kinerjaku 105,26%

- c. IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%) tercapai 100% dari target 76% dengan persentase kinerjaku 120%
2. LPSPL Sorong mempunyai 1 indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target kinerja yaitu:
 - a. IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen) tercapai 2 dokumen dari target 2 dokumen dengan persentase capaian 100%,
3. LPSPL Sorong mempunyai 1 indikator kinerja yang capaiannya kurang dari target kinerja yaitu :
 - a. IK 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong tercapai 83,69 dari target 85 atau 98,69%.

Dalam rangka mendukung kinerja LPSPL Sorong pada tahun anggaran 2025, DIPA awal LPSPL Sorong tahun 2025 sebesar Rp40.227.209.000 yang bersumber dari Rupiah Murni Rp8,450,539,000,00; PNBPN sebesar Rp1,625,000,000,00 dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp30,151,670,000,00 yang terbit pada tanggal 30 November 2024 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tanggal 24 Januari 2025. Hal ini juga sesuai dengan DIPA Petikan pagu definitif (pagu awal) tahun 2025 dengan Nomor: SP DIPA- 032.07.2.477440/2025 tanggal 2 Desember 2024. Anggaran tersebut mendukung 3 (tiga) program yaitu program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp30,651,670,000,00, program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp1.125.000.000,00, dan program dukungan manajemen sebesar Rp8.450.539.000,00. Jika dijabarkan 3 program tersebut menjadi 4 kegiatan yaitu (1) Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut sebesar Rp30,651,670,000,00,00; (2) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp300,000,000,00; (3) Perencanaan Ruang Laut sebesar Rp825,000,000,00; dan (4) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp8,450,539,000,00. Pada revisi DIPA 1 s.d 4 terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp10.502.610.000,00 yang terdapat pada belanja 52 sedangkan pada Revisi DIPA ke 5 tanggal 17 Juni 2025 dengan nomor SP DIPA- 032.07.2.477440/2025 terdapat pembukaan blokir dana yang bersumber dari PNBPN sebesar Rp882.895.000,00 sehingga total anggaran yang diblokir sebesar Rp 9.619.715.000,00. Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Rincian

serapan anggaran LPSPL Sorong Per RO (Lampiran V) yaitu Rp 1,794,106,562 atau 4.46% dari anggaran Rp40,227,209,000.

Pengukuran Kinerja capaian kinerja LPSPL Sorong dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja utama atau indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan yang tercantum di Perjanjian Kinerja (PK). Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada Triwulan II Tahun 2025 adalah **106,96** (kategori Hijau=Baik) (*kinerjaku.kkp.go.id*).

Guna meningkatkan capaian kinerja LPSPL Sorong pada tahun berikutnya perlu dilakukan beberapa perbaikan diantaranya melakukan monitoring dan evaluasi terkait deviasi dan DIPA LPSPL Sorong serta melakukan revisi pertama halaman III DIPA pada triwulan II tahun 2025. Pada Triwulan II akan ada buka blokir anggaran yang bersumber dari PNBP oleh karena itu disarankan agar LPSPL Sorong berkoordinasi dengan Sesditjen DJPK terkait MP PNBP untuk memastikan waktu anggaran dapat digunakan sehingga dukungan anggaran terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja dapat optimal. Terdapat Indikator Kinerja yang menggunakan sumber dana Pinjaman Luar Negeri, untuk mengantisipasi sumber dana tersebut masih belum dapat digunakan disarankan agar LPSPL Sorong dapat berkoordinasi dengan mitra kerja konservasi dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan kegiatan dan kegiatan dapat dilakukan bersama.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Isu Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	1
1.4 Tugas dan Fungsi.....	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
2 PERENCANAAN KINERJA.....	9
2.1 Rencana Strategis 2024-2029	9
2.2 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025	11
3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
3.1 Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong	17
3.1.1. Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi).....	17
3.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong.....	23
3.2.1. IK 2 Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang)	23
3.3 Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong	26
3.3.1. IK 3 Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	26
3.4 Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPSPL Sorong.....	30

3.4.1.	IK 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai)	30
3.5	Sasaran Kegiatan 5 Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau – pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	32
3.5.1.	IK 5 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	32
3.6	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	34
3.6.1.	IK 6 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	35
3.7	Sasaran Kegiatan 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong	37
3.7.1.	IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	38
3.7.2.	IK 8 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	40
3.7.3.	IK 9 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DJPKRL LINGKUP LPSPL SORONG (NILAI)	43
3.8.	Akuntabilitas Anggaran	71
3.9.	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya	76
4	PENUTUP	83
4.1	Kesimpulan	83
4.2	Rekomendasi	83
4.3	Tindaklanjut Atas Rekomendasi Periode Sebelumnya	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Lokasi satuan kerja dan wilayah kerja LPSPL Sorong	6
Tabel 1.2 Komposisi Pegawai LPSPL Sorong	7
Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025 berdasarkan PK LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.....	12
Tabel 2.2 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025 berdasarkan PK LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut.....	14
Tabel 3.1 IK Target dan Realisasi Kinerja LPSPL Sorong Triwulan II Tahun 2025.....	15
Tabel 3.2 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)	18
Tabel 3.3 Capaian IKU 2 Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang)	23
Tabel 3.4 Capaian IK 3 Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	27
Tabel 3.5 IK 6 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai).....	31
Tabel 3.6 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	33
Tabel 3.7 Capaian IKU 4 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	35
Tabel 3.8 Kategori nilai PM SAKIP	38
Tabel 3.9 Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	39
Tabel 3.10 Bobot Penilaian IKPA.....	41
Tabel 3.11 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	41
Tabel 3.12 Tabel Bobot Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satker	48
Tabel 3.13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup Lpspl Sorong (Nilai)	49
Tabel 3.14 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	51
Tabel 3.15 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	54
Tabel 3.16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)	57
Tabel 3.17 Capaian IK 13 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)	59
Tabel 3.18 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	64
Tabel 3.19 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)	66
Tabel 3.20 Bobot Penilaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik	69
Tabel 3.21 Capaian IK 16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	70
Tabel 3.22 Rincian Sumber Anggaran LPSPL Sorong Tahun 2025	72
Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Per Indikator pada Perjanjian Kinerja	73
Tabel 3.24 Daftar kegiatan dan pagu anggaran.....	76
Tabel 3.25 Membandingkan capaian kinerja LPSPL Sorong dengan Unit Pelaksana Teknis lain pada triwulan I tahun 2025.....	77
Tabel 3.26 Rincian Nilai IKPA LPSPL Sorong.....	81

Tabel 3.27 Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024.....	84
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPSPL Sorong.....	5
Gambar 1.2 Wilayah Kerja LPSPL Sorong	7
Gambar 3.1 NKO LPSPL Sorong Triwulan II Tahun 2025.....	15
Gambar 3.2 Forum Mitra LSM DKP Maluku Tahun 2025	19
Gambar 3.3 Survei Pemantauan Pemutihan Karang Di Perairan KKD Raja Ampat	20
Gambar 3.4 Dokumentasi <i>Surveyance Patrol Inside</i>	22
Gambar 3.5 Pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi terancam punah dan/atau apendiks CITES.....	29
Gambar 3.8 Kegiatan Pendukung IK 4	34
Gambar 3.6 Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendukung IK 4.....	37
Gambar 3.9 Dokumentasi pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja LPSPL Sorong setiap bulan	40
Gambar 3.10 Tangkapan Layar Surat Penyampaian dan Laporan SPIP TW IV tahun 2024 dan SPIP TW I Tahun 2025.....	52
Gambar Gambar 3.11 <i>Screenshot</i> Penilaian IP ASN Triwulan II tahun 2025	55
Gambar 3.13 <i>Screenshot</i> aplikasi SIDAK KKP	58
Gambar 3.14 Rapat Mingguan Pembangunan WBK WBBM Lingkup LPSPL Sorong.....	63
Gambar 3.15 Tangkapan layar persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan II tahun anggaran 2025	67

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan Data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 35/PERMEN-KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini adalah untuk menyampaikan capaian kinerja program atau kegiatan yang dilaksanakan LPSPL Sorong pada triwulan II tahun 2025.

1.3 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 berfokus pada pembangunan yang berkelanjutan, pengurangan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program ini akan diterapkan secara merata di seluruh daerah dan akan dievaluasi secara berkala. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) memiliki peran strategis

dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan terkait perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan ruang laut. Selain itu, Ditjen PKRL juga bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya kelautan, termasuk rehabilitasi, restorasi, pemanfaatan ekonomi, konservasi ekosistem laut dan biota, penanggulangan bencana kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam.

LPSPL Sorong berkedudukan di Sorong, Provinsi Papua Barat Daya dengan wilayah kerja yang meliputi Provinsi Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan. LPSPL Sorong sejak tahun 2011 telah memiliki 2 (dua) satker definitif yang berkedudukan di Kota Ambon dan Kabupaten Merauke (Permen-KP No. 65/PERMEN-KP/2020 jo Permen-KP No. PER-23/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Permen-KP No. PER-22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut).

LPSPL Sorong memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut mulai dari target rutin tahunan hingga tantangan yang diturunkan melalui Astacita Presiden Republik Indonesia, yaitu:

1. Perencanaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil yang partisipatif, serasi, dan implementatif melalui:
 - a. Fasilitasi Penyusunan materi teknis ruang dalam perumusan RTR Provinsi/RZ KAW dan RTR KSN/T dan Integrasi Dukungan penyusunan materi teknis ruang laut yang disusun oleh Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. Pendampingan Integrasi antara rencana tata ruang wilayah provinsi dengan RZWP3K, Integrasi antara rencana tata ruang KSN dengan rencana zonasi KSN/T di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - c. Pendampingan dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) yang didelegasikan kewenangannya kepada pemerintah daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - d. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang laut sesuai dengan rencana tata ruang/ rencana zonasi di wilayah kerja LPSPL Sorong;

- e. Dukungan pemberian KKPRL dan/atau insentif pemanfaatan ruang laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - f. Pengelolaan data KKPRL.
2. Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati Laut yang lestari dan berkelanjutan melalui:
- a. Pendampingan Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan KKPD di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - c. Penyediaan data sebaran dan status populasi jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - d. Pemulihan populasi/ Pengayaan jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - e. Inisiasi daerah perlindungan habitat penting jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - f. Rehabilitasi Habitat kritis jenis ikan dilindungi/terancam punah di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - g. Penanganan Biota Dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - h. Pelayanan perizinan/peredaran pemanfaatan keanekaragaman hayati di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - i. Inisiasi jejaring dan Kerjasama konservasi Kawasan dan keanekaragaman Hayati Laut di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - j. Pemberian Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) di wilayah kerja LPSPL Sorong.
3. Pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil yang lestari dan mandiri melalui:
- a. Identifikasi dan Pendampingan Bantuan Sarana dan Prasarana di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - b. Dukungan Identifikasi dalam rangka fasilitasi KKPRL untuk masyarakat lokal dan tradisional di wilayah kerja LPSPL Sorong;
 - c. Dukungan dalam rangka Pemanfaatan PPK/T di wilayah kerja LPSPL Sorong.
4. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil melalui:
- a. Identifikasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang akan ditanggulangi pencemarannya di wilayah kerja LPSPL Sorong;

- b. Identifikasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim di wilayah kerja LPSPL Sorong.
- 5. Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Ditjen PKRL melalui:
 - a. Pengelolaan SDM Aparatur dan tata laksana di LPSPL Sorong;
 - b. Penguatan Akuntabilitas Kinerja di LPSPL Sorong;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik di LPSPL Sorong;
 - d. Pengelolaan Keuangan, Barang Milik Negara, Pengadaan Barang Jasa dan Umum di LPSPL Sorong;

1.4 Tugas dan Fungsi

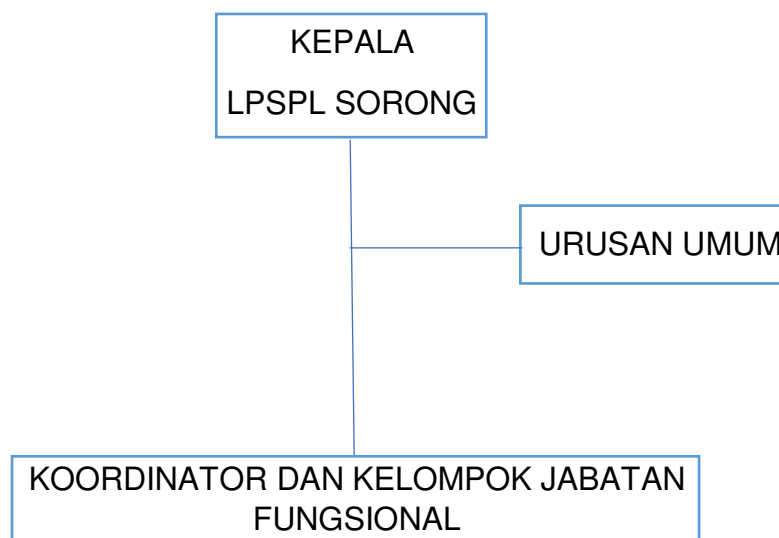
Berdasarkan Permen KP Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Dirjen PRL). Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (UPT PKRL) tersebut dipimpin oleh kepala. UPT PRL terdiri atas UPT KKPN dan UPT PSPL. Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri atas: Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) dan Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL). Klasifikasi UPT Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut tersebut didasarkan pada analisis beban kerja.

LPSPL Sorong sebagai salah satu UPT PRL mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b. pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;

- c. pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d. pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- e. pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Struktur organisasi LPSPL Sorong sesuai dengan peraturan tersebut, sebagaimana berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi LPSPL Sorong

Susunan organisasi Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri atas: Urusan Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PRL sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah

Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja. Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut dibentuk satuan kerja sesuai dengan kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja. Satuan kerja tersebut merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang dipimpin oleh koordinator satuan kerja. Koordinator satuan kerja tersebut ditetapkan oleh Dirjen PRL. Berikut lokasi, satuan kerja, dan wilayah kerja LPSPL Sorong berdasarkan Permen KP Nomor 65/PERMEN-KP/2020:

Tabel 1.1 Lokasi satuan kerja dan wilayah kerja LPSPL Sorong

UPT	Lokasi	Satuan Kerja	Wilayah Kerja
Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL)	Sorong, Provinsi Papua Barat Daya	Ambon	Provinsi Maluku
		Ternate	Provinsi Maluku Utara
		Merauke	Provinsi Papua Selatan
		-	Provinsi Papua
		-	Provinsi Papua Pegunungan
		-	Provinsi Papua Tengah
		-	Provinsi Papua Barat
		-	Provinsi Papua Barat Daya

Wilayah Kerja LPSPL Sorong sesuai lampiran VI Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65 Tahun 2020 seperti terlihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.2 Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Pada triwulan II tahun 2025, jumlah SDM yang dimiliki LPSPL Sorong mencapai 45 orang yang terdiri dari 28 orang PNS, 2 orang PPPK, 21 orang tenaga kontrak jasa perorangan, dan 2 PPNPN dengan komposisi pegawai sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Komposisi Pegawai LPSPL Sorong

No.	Uraian	Tingkat Pendidikan					
		SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	D3	D4/S1	S2
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	-	-	1	2	21	4
2.	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)	-	-	-	-	2	-
3.	Tenaga Kontrak Jasa Perorangan (JLP)	-	-	11	3	9	-
4.	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	-	-	-	1	1	-
Jumlah		-	-	12	6	33	4

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 adalah:

a. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut,

tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis, gambaran mengenai sasaran program Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2024-2029, rencana kerja dan anggaran LPSPL Sorong tahun 2025, dan penetapan kinerja LPSPL Sorong

c. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. BAB IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2024-2029

RPJMN 2025-2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan tahapan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Emas. RPJMN 2025-2029 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP.

RPJMN 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden menetapkan 5 arahan utama sebagai strategi pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi. Kelima arahan utama ini dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029 yaitu :

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Rencana pembangunan 2025-2029 membidik tiga sasaran utama pembangunan nasional, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pencapaian target sasaran ini diukur dengan sejumlah indikator, di antaranya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 4,5-5 persen, indeks modal manusia (IMM) mencapai 0,59 persen, serta pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen di tahun 2029. Sasaran tersebut diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan.

Visi RPJMN mengikuti Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045.

Visi KKP tahun 2025-2029 adalah “Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan, Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Dalam rangka mendukung visi KKP, maka Visi Ditjen PKRL 2024-2029 adalah “Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP”.

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2024-2029, KKP misi sesuai misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia, melalui peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, melalui peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional,

3. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,
4. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Dalam rangka mendukung Misi KKP tersebut, Ditjen PKRL mempunyai 3 (tiga) Misi yaitu:

1. peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan Ditjen PKRL.

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil dan dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Penjabaran dari Sasaran Strategis (SS) KKP tahun 2024-2029, yang didukung oleh Sasaran Program (SP) Ditjen PKRL terdiri dari:

SS-1 Terwujudnya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan,

SS-2 Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan,

SS-3 Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas,

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh Ditjen PKRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan dari pelaksanaan program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen.

2.2 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025

Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025 ditandatangani pada tanggal 24 Januari 2025 dan diubah dengan Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan yang ditanda tangani pada tanggal Juni 2025 yang memuat 16 Indikator Kinerja dengan anggaran sebesar Rp39.402.209.000,00 yang mendukung kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan.

Tabel 2.1 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025 berdasarkan PK LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong	1.	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)	3
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong	2.	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)	20
3.	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong	3.	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	3
4.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	4.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	2
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau - pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	5.	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau - pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	70
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	89

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	71,5
		9. Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	4
		10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	80
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)	95
		12. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPSPL Sorong (%)	100
		13. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	75
		14. Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	80
		15. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)	76
		16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	91

Selain itu terdapat Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut yang ditanda tangani pada Mei 2025 yang memuat 1 Indikator Kinerja dengan anggaran Rp885.000.000,00 yang mendukung kegiatan Perlindungan dan Penataan Ruang Laut Lingkup Ditjen Penataan Ruang Laut.

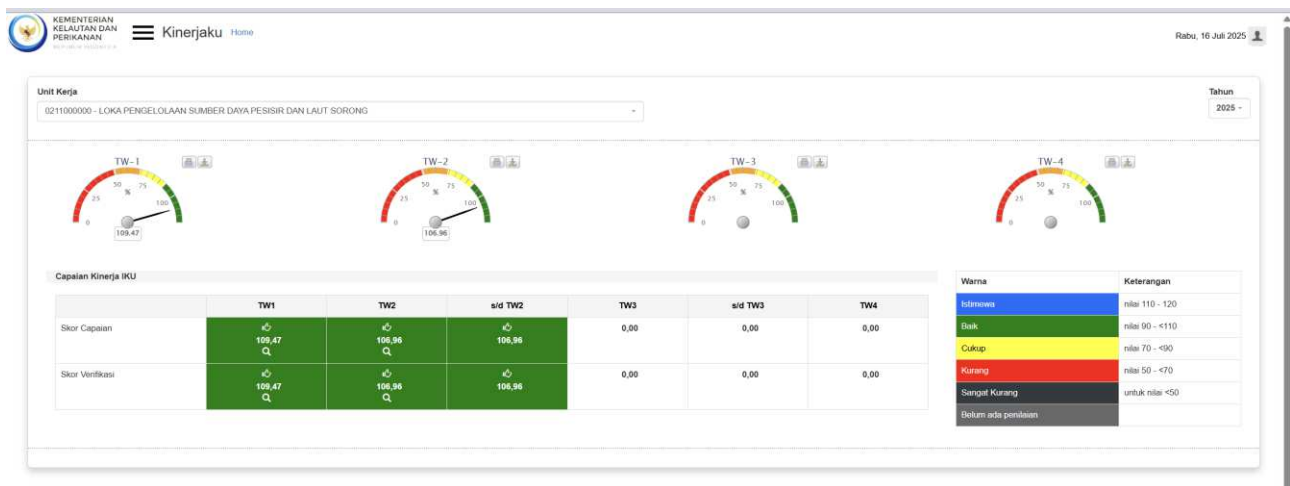
Tabel 2.2 Indikator dan Target Kinerja LPSPL Sorong Tahun 2025 berdasarkan PK LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	1.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	2

Sumber anggaran LPSPL Sorong pada tahun 2025 berasal dari Rupiah Murni Rp 8,450,539,000, pinjaman luar negeri Rp 30,151,670,000 dan PNBPNP Rp. 1,625,000,000, akan tetapi pada halaman IV.A DIPA Nomor: DIPA-032.07.2.477440/2024 dijelaskan bahwa terdapat jumlah dana yang tidak dapat dicairkan sejumlah Rp. 10,502,610,000 yang merupakan belanja barang (52). Pada revisi DIPA dengan nomor SP DIPA-032.07.2.477440/2025 tanggal 17 Juni 2025 terdapat pembukaan blokir dana yang bersumber dari PNBPNP sebesar Rp882.895.000,00 sehingga total anggaran yang diblokir sebesar Rp 9.619.715.000,00. sehingga mempengaruhi pelaksanaan beberapa kegiatan.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja LPSPL Sorong dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi IKU/IKM. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id/>. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja LPSPL Sorong pada Triwulan II Tahun 2025 adalah **106,96** (kategori Hijau=Baik), seperti gambar 3.1 berikut:



Gambar 3.1 NKO LPSPL Sorong Triwulan II Tahun 2025.

Indikator Kinerja (IK) serta target dan realisasinya pada triwulan II tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 IK Target dan Realisasi Kinerja LPSPL Sorong Triwulan II Tahun 2025

Sasaran Kegiatan 1. Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong						
IK		FREKUENSI	TARGET	TAHUN 2025		
				TARGET	REALISASI	% KINERJAKU
IK 1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)	Tahunan	3	-	-	-
Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong						
IK 2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan	Tahunan	20	-	-	-

	Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)					
Sasaran Kegiatan 3. Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong						
IK 3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	Tahunan	3	-	-	-
Sasaran Kegiatan 4. Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong						
IK 4	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	Tahunan	2	-	-	-
Sasaran Kegiatan 5. Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau - pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong						
IK 5	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau - pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	Tahunan	1	-	-	-
Sasaran Kegiatan 6. Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPSPL Sorong						
IK 6	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	80	-	-	-
Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong						
IK 7	Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	70	-	-	-
IK 8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Semesteran	85	-	83,89	98,69%
IK 9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	71,5	-	-	-
IK 10	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	Triwulan	2	-	2	100%
IK 11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	Semester	78	-	84,62	108,49%
IK 12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk	Tahunan	95	-	100	105,26%

	Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)					
IK 13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPSPL Sorong (%)	Tahunan	100	-	-	-
IK14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	75	-	-	-
IK 15	Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	80	-	-	-
IK 16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)	Tahunan	76	-	100	120%
IK 17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	Tahunan	91	-	-	-

3.1 Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan 1 Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 1 ini kedalam 1 IKU yaitu Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi).

3.1.1. Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)

Daerah yang difasilitasi dan/atau dilakukan pendampingan penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong adalah jumlah daerah (provinsi) di wilayah kerja LPSPL Sorong yang dilakukan fasilitasi oleh LPSPL Sorong dalam upaya pengelolaan Kawasan konservasi.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong yang difasilitasi dan/atau dilakukan pendampingan penilaian efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi

Tabel 3.2 Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)

SK.1	Terfasilitasinya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong							
IK.1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)							
Realisasi 2024		Tahun 2025					Tahun 2025	
TW I	Target 2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	-	3	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. Capaian IK Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi) Triwulan II Tahun 2025

Target IKU Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi) pada tahun 2025 yaitu 3 Provinsi. Periode capaian dan periode pelaporan IKU ini adalah tahunan, sehingga pada triwulan II tahun 2025 IKU ini belum bisa diukur capaiannya.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2024

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini adalah tahunan dan merupakan IKU baru sehingga tidak dapat dibandingkan.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala, dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong aktif melakukan pendampingan dan fasilitasi terhadap pemerintah daerah untuk mendukung peningkatan efektivitas Kawasan konservasi Daerah. Hal ini juga didukung oleh SDM LPSPL Sorong yang memiliki kemampuan dalam upaya mendukung pengelolaan Kawasan Konservasi seperti inventarisasi sumber daya ekologi, sosial, ekonomi dan budaya di dalam Kawasan Konservasi sehingga mampu berkontribusi secara langsung untuk mendukung peningkatan efektivitas Kawasan konservasi.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pelaksanaan IKU ini direncanakan menggunakan anggaran yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) *Ocean for Prosperity* namun anggaran tersebut baru dapat direalisasikan pada Juni 2025 karena adanya penghentian

sementara kegiatan LAUTRA berdasarkan Surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) *Oceans for Prosperity Project*.

c. Solusi

LPSPL Sorong dapat meningkatkan kerja sama dengan mitra konservasi dan pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan IKU ini dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi anggaran yang ada.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)

Mendukung capaian Indikator Kinerja ini hingga Triwulan II tahun 2025 LPSPL Sorong telah melakukan kegiatan Rapat Rencana Kerja Tahunan Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan memperkuat koordinasi, mengevaluasi capaian kerja sama, mengelaborasi rencana kerja tahun berikutnya, serta membahas isu-isu strategis terkait pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan, berkeadilan dan berkearifan lokal.



Gambar 3.2 Forum Mitra LSM DKP Maluku Tahun 2025

Dilaksanakan juga survei pemantauan pemutihan karang di perairan sekitar Pulau Matan, Pulau Jefman, Pulau Bam dan Pulau Senapan yang merupakan wilayah yang termasuk kedalam Kawasan Konservasi Daerah Raja Ampat. Pelaksanaan kegiatan pemantauan pemutihan karang dilakukan sesuai dengan surat himbauan dari Direktur

Konservasi Ekosistem Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan-KKP, agar berkontribusi secara sukarela melakukan pemantauan kondisi terumbu karang sesuai rancangan lokasi dan waktu yang relevan dengan masing-masing instansi/lembaga untuk melihat pengaruh peningkatan suhu permukaan laut terhadap terumbu karang yang diperkirakan akan terjadi mulai bulan Mei hingga bulan Juli 2025. Secara umum hasil pemantauan yang telah dilakukan oleh Loka PSPL Sorong di beberapa titik dikawasan konservasi perairan Kep. Raja Ampat tersebut, menunjukkan bahwa beberapa area terumbu karang telah mulai mengalami pemutihan dengan kisaran sekitar <25% meskipun tidak seluruh areal terumbu karang terjadi pemutihan namun temuan tersebut dapat menjadi bahan untuk analisis lanjutan mengenai apakah pengaruh kenaikan suhu permukaan laut telah terjadi di kawasan konservasi perairan Kep. Raja Ampat atau ada faktor lain yang mempengaruhi pemutihan tersebut.



Gambar 3.3 Survei Pemantauan Pemutihan Karang Di Perairan KKD Raja Ampat

Pada tanggal 23 hingga 26 Juni 2025, telah dilaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan (Surveillance Patrol Inside) secara serentak di KKD Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya dan KKD Mare di Maluku Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Ocean for Prosperity (LAUTRA) yang dikoordinasikan oleh Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong. Patroli ini melibatkan tim gabungan dari berbagai instansi terkait, antara lain Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya, UPTD Pengelola KK Raja Ampat, Direktorat Polairud Polda PBD, PSDKP, dan Balai Besar KSDA Papua Barat. Lokasi pengawasan mencakup empat area di Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya (Misool, Ayau, Kofiau-Boo, Selat Dampier) dan KKD Pulau Mare di Provinsi Maluku Utara.

Secara umum, hasil patroli menunjukkan tingkat kepatuhan yang bervariasi di setiap kawasan. KKD Pulau Mare menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi dan

dapat menjadi model pengelolaan. Sebaliknya, kawasan perairan Raja Ampat menunjukkan dinamika yang lebih kompleks, dengan adanya temuan pelanggaran serius yang memerlukan penegakan hukum, berdampingan dengan potensi ekonomi lokal. Isu yang menjadi temuan umum adalah masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dan pelaku usaha mengenai batas-batas zonasi kawasan konservasi dan kewajiban memiliki Perizinan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

1. Area V - Perairan Kepulauan Kofiau-Boo

- **Pelanggaran Serius:** Ditemukan dua nelayan yang melakukan penangkapan hiu dan pari serta praktik *shark finning*, yang melanggar Perda Kabupaten Raja Ampat. Barang bukti telah diamankan dan diserahkan kepada pihak berwenang untuk dimusnahkan.
- **Aktivitas Ilegal di Cagar Alam Laut (CAL):** Ditemukan 10 nelayan yang melakukan penangkapan udang mantis di dalam area CAL Kofiau, yang merupakan zona proteksi mutlak. Pelanggaran terjadi karena ketidakpahaman nelayan mengenai status dan batas wilayah CAL.
- **Isu Perizinan Usaha:** Ditemukan bahwa PT Karya Alam Bahari (perusahaan budidaya mutiara) yang beroperasi di dalam CAL belum memiliki PKKPRL yang sesuai.

2. Area IV - Kepulauan Misool

- **Pelanggaran Zona Inti:** Ditemukan aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan lokal di dalam Zona Inti. Pelanggaran ini disebabkan oleh ketidaktahuan nelayan mengenai batas zonasi. Tim melakukan pendekatan edukatif dan sosialisasi di lokasi.
- **Kepatuhan Perizinan:** Teridentifikasi adanya kegiatan usaha (budidaya mutiara dan *homestay*) yang beroperasi tanpa memiliki PKKPRL.
- **Temuan Positif:** Terdapat kegiatan rehabilitasi ekosistem melalui transplantasi terumbu karang yang diinisiasi oleh mitra lokal dengan tingkat keberhasilan yang baik.

3. Area I - Kepulauan Ayau

- **Aktivitas Pemanfaatan:** Aktivitas masyarakat didominasi oleh perikanan tangkap skala kecil yang sesuai dengan aturan.

- **Potensi Ekonomi:** Teridentifikasi adanya potensi pengembangan budidaya rumput laut oleh masyarakat lokal.
- **Catatan Pengawasan:** Patroli di Pulau Fani dinilai tidak perlu menjadi prioritas di masa mendatang karena telah terdapat pos pengamanan permanen dari TNI-AL.

4. Area Selat Dampier & Kepulauan Fam

- **Tingkat Kepatuhan:** Tidak ditemukan pelanggaran zonasi yang signifikan. Aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan lokal terpantau dilakukan di zona yang diizinkan.
- **Aktivitas Pariwisata:** Kegiatan pariwisata, khususnya kapal *Live on Board* (LOB), terpantau minim karena periode patroli bertepatan dengan musim ombak (*low season*).
- **Monitoring Biota Laut:** Tim menjumpai mamalia laut (lumba-lumba) dan reptil laut (penyu hijau), yang menjadi indikator positif bagi kesehatan ekosistem perairan.

5. KKD Pulau Mare (Provinsi Maluku Utara)

- **Kepatuhan Tinggi:** Seluruh aktivitas pemanfaatan yang terpantau (22 aktivitas) telah sesuai dengan peruntukan zonasinya. Tidak ditemukan adanya pelanggaran, menjadikan kawasan ini sebagai contoh keberhasilan pengelolaan partisipatif.



Gambar 3.4 Dokumentasi *Surveyance Patrol Inside*

5. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

LPSPL Sorong akan melakukan koordinasi dengan mitra konservasi dan pemerintah Daerah di Wilayah Kerja LPSPL Sorong terkait pelaksanaan penilaian Evaluasi Efektivitas Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong. Pelaksanaan kegiatan Lautra seperti surveylance patrol inside di Kawasan Konservasi Daerah di Provinsi Papua Barat Daya, Maluku dan Maluku Utara, Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis dan monitoring biofisik di KKD Mare.

3.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong, LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 2 ini kedalam 1 IKU, yaitu masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang).

3.2.1. IK 2 Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang)

Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) adalah Masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya melalui kegiatan pelatihan/bimtek yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan konservasi secara berkelanjutan dan mendukung pengelolaan kawasan konservasi.

Teknik menghitung capaian IKU ini dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan masyarakat di dalam/sekitar kawasan konservasi yang ditingkatkan kapasitasnya agar dapat melakukan kegiatan pemanfaatan Kawasan konservasi secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong

Tabel 3.3 Capaian IKU 2 Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang)

SK.2		Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong						
IK.2		Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					Tahun 2025	
TW I	Target 2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	-	20	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. *Capaian IK Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) Triwulan II Tahun 2025*

Target IK Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) pada tahun 2025 yaitu 20 Orang. Periode capaian dan periode pelaporan IKU ini adalah tahunan, sehingga pada triwulan II tahun 2025 IKU ini belum bisa diukur capaiannya.

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025*

Sasaran kegiatan meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong dengan IKU Masyarakat Yang Ditingkatkan Kapasitas Dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi Di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Orang) merupakan Sasaran Kegiatan, Indikator, dan Target baru oleh sebab itu indikator kinerja ini tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

3. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi*

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong memiliki hubungan yang baik dan mendapat dukungan dari Pengelola Kawasan Konservasi Daerah serta Satuan Kerja Instansi Pemerintah terkait lainnya di wilayah kerja LPSPL Sorong. Selain itu banyak mitra kerja konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong yang aktif dalam melakukan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat di dalam kawasan konservasi yang siap mendukung rencana kerja LPSPL Sorong.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

IKU ini direncanakan menggunakan anggaran yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Ocean for Prosperity namun anggaran tersebut belum dapat dicairkan pada Juni 2025 karena adanya penghentian sementara kegiatan LAUTRA berdasarkan Surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Oceans for Prosperity Project.

c. Solusi

LPSPSPL Sorong dapat meningkatkan kerja sama dengan mitra konservasi dan pemerintah daerah untuk tetap melaksanakan IKU ini dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan dengan kondisi anggaran yang ada.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 2

Kegiatan ini masih dalam tahap persiapan pada triwulan II, upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini adalah identifikasi kelompok Masyarakat dan koordinasi dengan pengelola kawasan konservasi daerah dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat dalam Upaya pemanfaatan Kawasan konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong.

5. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

LPSPL Sorong akan melakukan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam Upaya pemanfaatan Kawasan konservasi di Wilayah Kerja LPSPL Sorong.

3.3 Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong, LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 3 ini kedalam 1 IKU yaitu Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis).

3.3.1. IK 3 Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan adalah jenis ikan yang dilakukan upaya pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

- a. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau look alike species;
- b. Pendampingan/Sosialisasi pemanfaatan jenis ikan;

Target jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan adalah Hiu, Pari, dan Arwana di wilayah kerja LPSPL Sorong. Formula perhitungan IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dimanfaatkan Secara Berkelanjutan melalui Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES, dan/atau *look alike species* dan Pendampingan/Sosialisasi pemanfaatan jenis ikan yang dimanfaatkan di wilayah kerja LPSPL Sorong dalam kurun waktu 1 Tahun.

Tabel 3.4 Capaian IK 3 Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)

SK.3	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong							
IK. 3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)							
Realisasi 2024		Tahun 2025					Tahun 2025	
TW I	Target 2024	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	-	3	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. Capaian IK Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis) Triwulan II Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan II tahun 2025 tidak terdapat capaian. Jenis ikan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan hingga triwulan II adalah Hiu, Pari, Arwana dan Teripang.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2024 dan 2025 yaitu tahunan. Sehingga pada triwulan II tidak dapat dibandingkan capaiannya.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Terdapat sosialisasi SOP pelayanan Hiu dan Pari di wilayah kerja LPSPL Sorong kepada pelaku usaha Hiu dan Pari secara berkala, adanya transparansi dalam pelayanan penerbitan SR dan SAJI-DN, pelayanan berbasis aplikasi e-SAJI juga mempermudah dalam melakukan pelayanan, dan selalu berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada para pelaku usaha Hiu dan Pari. Komitmen tersebut tertulis pada Maklumat Pelayanan dan Pakta Integritas. Hal ini juga didukung SDM LPSPL Sorong yang dapat diandalkan/tersertifikasi dalam mengidentifikasi jenis ikan yang dimanfaatkan serta penguasaan penggunaan system aplikasi e-SAJI. Selain itu, nilai indeks kepuasan masyarakat pada triwulan II tahun 2025 pada aplikasi susan KKP adalah 97,22 (sangat baik). Pelayanan LPSPL Sorong juga telah tersertifikasi ISO 9001:2015 dan mendapat predikat pelayanan prima dari Inspektorat Jendral KKP.

Saat ini guna meningkatkan kualitas pelayanan LPSPL Sorong juga sedang berproses untuk tersertifikasi ISO 37001:2016.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Belum terdapat regulasi turunan terkait pelimpahan pemanfaatan jenis ikan pasca ditetapkannya UU 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi pelaku usaha jenis ikan terancam punah dan apendiks CITES untuk melakukan perdagangan. Permasalahan ini juga menyebabkan terbatasnya peran LPSPL Sorong dalam upaya pengelolaan jenis ikan dilindungi, terancam punah dan atau apendiks CITES.

Selain itu terdapat permasalahan keterbatasan verifikator pelayanan pemanfaatan jenis ikan di wilayah kerja LPSPL Sorong akibat terbatasnya pegawai LPSPL Sorong sedangkan Jumlah pelaku usaha pemanfaat jenis ikan dilindungi terancam punah dan atau apendiks CITES terus bertambah sehingga menyebabkan penumpukan permohonan penerbitan SAJI dan/atau SR.

c. Solusi

LPSPL Sorong dapat berkoordinasi dengan Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik terkait regulasi turunan dan kepastian pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah dan atau apendiks CITES yang dikelola KKP dan memastikan peran KKP terkait Management Authority CITES pasca ditetapkannya UU 32 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Keterbatasan verifikator jenis ikan dilindungi di wilayah kerja LPSPL Sorong dapat ditanggulangi dengan cara melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha jenis ikan dilindungi, terancam punah dan apendiks CITES di wilayah kerja LPSPL Sorong terkait masa berlaku SAJI dan SR yang mencapai 60 hari. Sehingga pelaku usaha dapat mengajukan permohonan dengan jarak waktu pengiriman yang lebih panjang.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 3

LPSPL Sorong pada triwulan II tahun 2025 melakukan kegiatan pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi terancam punah, dilindungi dan/atau apendiks CITES, penilaian survei kepuasan Masyarakat dan persiapan pembagian kuota tahap kedua.



Gambar 3.5 Pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi terancam punah dan/atau apendiks CITES

Jenis ikan yang dilakukan pemanfaatan secara berkelanjutan pada bulan April adalah Arwana, Hiu, Pari dan Teripang Pada April telah diterbitkan dokumen :

- SAJI DN Hiu dan Pari Apendiks CITES sebanyak 41 dokumen
- SAJI DN Arwana 1 Dokumen dan SAJI DN Arwana Tentengan 3 Dokumen
- Surat Rekomendasi DN Hiu, Pari dan Teripang Non Apendiks CITES 46 dokumen.

Total Dokumen perizinan pemanfaatan jenis ikan yang diterbitkan pada April adalah 91 Dokumen.

Sementara itu pada bulan Mei jenis ikan yang dimanfaatkan adalah Arwana, Hiu, Pari dan Teripang. Pada Mei telah diterbitkan dokumen

- SAJI DN Hiu dan Pari Apendiks CITES sebanyak 26 dokumen
- SAJI DN Tentengan Arwana 1 Dokumen
- Surat Rekomendasi DN Hiu, Pari dan Teripang Non Apendiks CITES 54 dokumen.

Total Dokumen perizinan pemanfaatan jenis ikan yang diterbitkan pada Mei adalah 81 Dokumen

Bulan Juni jenis ikan yang dilakukan pemanfaatan adalah Arwana, Hiu, Pari dan Teripang. Pada Juni telah diterbitkan dokumen

- SAJI DN Hiu dan Pari Apendiks CITES sebanyak 28 dokumen
- SAJI DN Tentengan Arwana 1 Dokumen
- Surat Rekomendasi DN Hiu, Pari dan Teripang Non Apendiks CITES 57 dokumen.

Total Dokumen perizinan pemanfaatan jenis ikan yang diterbitkan pada Juni adalah 66 Dokumen

5. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Pada triwulan III tahun 2025 LPSPL Sorong akan melakukan kegiatan pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, terancam punah dan atau apendiks CITES serta melakukan persiapan pembagian kuota tahap III.

3.4 Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPSPL Sorong. LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 1 ini kedalam 1 IK, yaitu IK Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai).

3.4.1. IK 4 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai)

Nilai minimum kinerja pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik merupakan nilai terendah yang harus dicapai dalam pelaksanaan pelayanan perizinan pemanfaatan berkelanjutan spesies dan genetik.

Ruang Lingkup:

- a. Jenis Ikan dilindungi berdasarkan ketentuan nasional (Ikan yang dilindungi penuh dan dilindungi terbatas);
- b. Jenis ikan masuk dalam Apendiks CITES;
- c. Jenis ikan yang masuk dalam daftar Jenis Asing Invasif (JAI); dan
- d. Jenis Ikan yang masuk dalam daftar Sumber Daya Genetik.

Jenis ikan tersebut dilakukan intervensi melalui program pelayanan perizinan melalui (1) pengendalian aspek legal melalui penyiapan NSPK terkait pelayanan perizinan; (2) peningkatan kapasitas SDM pelayanan perizinan; (3) Sosialisasi, edukasi dan pendampingan pelayanan perizinan; (4) penguatan sarana prasarana pelayanan perizinan; (5) Pelaksanaan layanan perizinan; (6) Monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan.

Tabel 3.5 IK 6 Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai)

SK.6	Meningkatnya pelayanan perizinan pemanfaatan biota di Wilayah Kerja LPSPL Sorong						
IK.6	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	80	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. Capaian IK Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Nilai) Triwulan II Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan II tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan II 2024 dan Triwulan II Tahun 2025

IK ini memiliki frekuensi pengukuran capaian tahunan sehingga pada triwulan II tahun 2024 dan 2025 tidak dapat dibandingkan capaiannya.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Ketercapaian target ini didukung oleh beberapa factor diantaranya sumberdaya manusia (SDM) LPSPL Sorong telah mengikuti bimbingan teknis terkait pelayanan publik dan/atau pelayanan prima sehingga kompetensinya mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jasa. Selain itu sebagai bentuk evaluasi kualitas layanan secara berkala LPSPL Sorong aktif melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan IK ini adalah sehubungan dengan adanya surat instruksi presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan untuk mendukung pelaksanaan IK dan terdapat blokir PNPB hingga Juni 2025 sehingga pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran PNPB tertunda.

c. Solusi

Menghadapi tantangan ini LPSPL Sorong berupaya melakukan kegiatan secara daring dan menggunakan form digital sehingga tidak menggunakan banyak biaya.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 4

Triwulan II LPSPL Sorong telah melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM) terkait kualitas pelayanan public dan diperoleh nilai 97,22. Survei tersebut dilakukan kepada seluruh pengguna jasa LPSPL Sorong dengan jumlah responden sebanyak 54 orang. Dilakukan juga tindak lanjut kegiatan survei kepuasan Masyarakat terkait. Selain itu telah dilakukan kegiatan pelayanan publik terkait pemanfaatan jenis ikan dilindungi, terancam punah dan atau apendiks CITES di wilayah kerja LPSPL Sorong.

5. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Pada triwulan III tahun 2025 LPSPL Sorong akan melaksanakan kegiatan penilaian survei Kepuasan Masyarakat dan sosialisasi SOP pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, terancam punah dan/atau apendiks CITES.

3.5 Sasaran Kegiatan 5 Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau – pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan meningkatnya pelaksanaan konvensi dan kontribusi kerjasama, jejaring, dan kemitraan untuk mendukung konservasi yang efektif di wilayah kerja LPSPL Sorong, LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 5 ini kedalam 1 IK yaitu IK Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen).

3.5.1. IK 5 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil. Teknik menghitung capaian IKU ini dengan cara

menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen identifikasi pemanfaatan pulau-pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong. Target capaian IK ini adalah 1 dokumen.

Tabel 3.6 Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

SK.5	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau – pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong						
IK.5	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	1	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau – pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen) Triwulan II Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan II tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025

IK ini memiliki frekuensi pengukuran capaian tahunan sehingga pada triwulan II tahun 2024 dan 2025 tidak dapat dibandingkan capaiannya.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

Ketercapaian target ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya sumberdaya manusia (SDM) LPSPL Sorong yang handal dalam mengolah citra satelit dan data spasial sehingga proses pengerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan IK ini adalah adanya blokir PNB dan belum terdapat Maksimum Pencairan PNB hingga triwulan II tahun 2025.

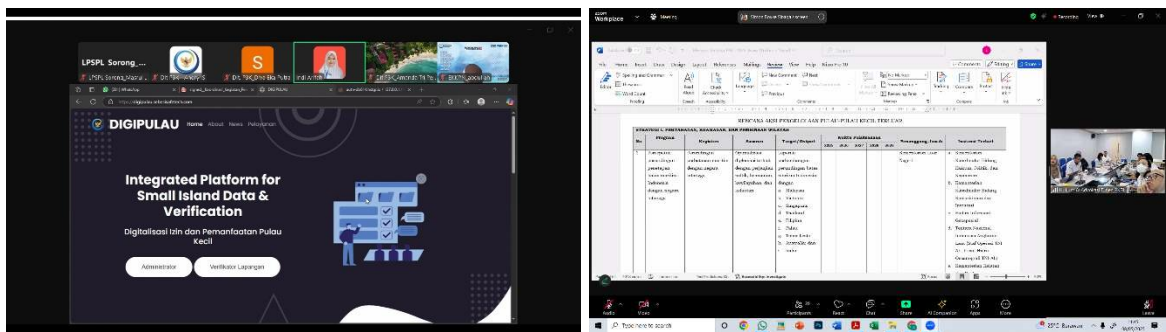
c. Solusi

Mengatasi tantangan ini disarankan agar LPSPL Sorong dapat bersurat ke Sekretarian Jenderal Pengelolaan Kelautan.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 5

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025 adalah Pembahasan lanjutan revisi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dilaksanakan guna mendapatkan saran dan

masukan dari seluruh direktorat lingkup DJPK dan seluruh UPT DJPK. Adapun poin-poin atau nomenklatur yang dilakukan revisi yakni pada beberapa bagian batang tubuh (Menimbang, Bab I Ketentuan Umum, Bab II Lingkup Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Bab III Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Dan Bab IV Ketentuan Penutup) dan Lampiran Rencana Aksi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar 2025 - 2029. Selain itu dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pendataan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diselenggarakan oleh Direktorat P3K-Ditjen Pengelolaan Kelautan yang diikuti oleh seluruh UPT lingkup DJPK. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting. Kegiatan koordinasi dilaksanakan oleh Direktorat P3K dalam rangka mendapatkan saran dan masukan dari para pengguna untuk penyempurnaan sistem online pendataan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang sedang dikembangkan.



Gambar 3.6 Kegiatan Pendukung IK 4

5. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Rencana aksi triwulan III tahun 2025 untuk mendukung IK ini adalah melakukan pendataan pemanfaatan pulau pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong secara langsung.

3.6 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong. LPSPL Sorong menjabarkan sasaran kegiatan 4 ini kedalam 1 IKU, yaitu IKU Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen).

3.6.1. IK 6 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

Kegiatan verifikasi dan pengendalian pemanfaatan ruang laut merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang laut, antara lain dapat mengetahui:

- Melakukan penilaian teknis terhadap permohonan KKPR yang masuk melalui OSS dan/atau aplikasi e-Sea
- Melakukan pengendalian pemanfaatan ruang laut berupa identifikasi pengendalian dan penilaian kepatuhan KKPR
- Mengetahui potensi dari PNBP;

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya kegiatan pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang dilakukan melalui kegiatan identifikasi dan verifikasi pemanfaatan ruang laut. Target capaian IK ini adalah 2 Dokumen yang terdiri dari dokumen Monitoring dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut dan Dokumen Pelaksanaan Verifikasi Teknis Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut.

Tabel 3.7 Capaian IKU 4 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)

SK.6	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong						
IK.6	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	2	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. Capaian IK Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen) Triwulan II Tahun 2025

Capaian IK Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan II tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan II 2024 dan Triwulan II Tahun 2025

IK ini memiliki frekuensi pengukuran capaian tahunan sehingga pada triwulan II tahun 2024 dan 2025 tidak dapat dibandingkan capaiannya.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

d. Analisis Keberhasilan

Ketercapaian target ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya sumberdaya manusia (SDM) LPSPL Sorong telah mengikuti bimbingan teknis terkait penyelenggaraan KKPRL sehingga kompetensinya menunjang pelaksanaan kegiatan, koordinasi aktif dengan dengan Direktorat Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, serta Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait.

e. Analisis Kegagalan/Kendala

Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan IK ini adalah sehubungan dengan adanya surat instruksi presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan untuk mendukung pelaksanaan IK.

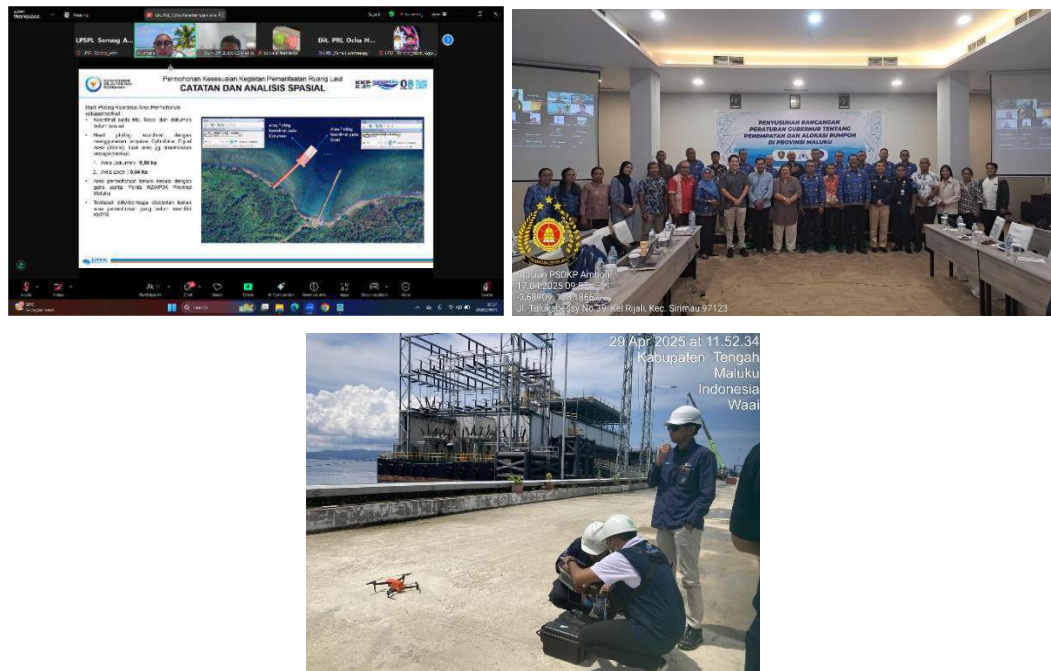
f. Solusi

Menghadapi tantangan ini LPSPL Sorong berupaya melakukan kegiatan secara daring, namun terdapat tantangan lain yaitu detail informasi yang diperoleh hanya berdasar pada proses wawancara tanpa ada peninjauan lapangan, oleh karena itu disarankan agar dibuat SOP untuk pelaksanaan kegiatan monitoring atau pengendalian secara daring untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tetap memenuhi standar informasi yang diperlukan.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 4

Hingga triwulan II tahun 2025 LPSPL Sorong telah melaksanakan kegiatan pendukung seperti :

1. Penilaian teknis KKPRL resiko rendah diwilayah kerja LPSPL Sorong sebanyak 32 kali
2. Pengendalian KKPRL di wilayah kerja LPSPL Sorong sebanyak 7 kali
3. Asistensi Pengurusan dokumen KKPRL
4. Rapat Kick Off dan Diseminasi Kajian Penempatan Rumpon



Gambar 3.7 Dokumentasi pelaksanaan kegiatan pendukung IK 4

5. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Pada triwulan III tahun 2025 LPSPL Sorong akan melaksanakan kegiatan penilaian teknis KKPRL resiko rendah dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang laut di Wilayah kerja LPSPL Sorong.

3.7 Sasaran Kegiatan 7 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong, maka LPSPL Sorong menjabarkan dalam 11 IK, yaitu (i) IK 6 Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (ii) IK 7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (iii) IK 8 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (iv) IK 9 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen), (v) IK 10 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks) (vi) IK 11 nilai Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%), (vii) IK 12 Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPSPL Sorong (%), (viii) IK 13 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai) (ix) IK 14 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai), (x) IK 15 Persentase rencana umum

pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%), (xi) IK 16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai).

3.7.1. IK 7 Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni:

- perencanaan kinerja (30%);
- pengukuran kinerja (30%);
- pelaporan kinerja (15%); dan
- evaluasi kinerja (25%).

Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PRL sesuai dengan kategori (Tabel 3.8)

Tabel 3.8 Kategori nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang

		Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 3.9 Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

SK.7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong						
IK 7	Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	88	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. *Capaian IKM Nilai PM SAKIP lingkup LPSPL Sorong (Nilai) Triwulan II Tahun 2025*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan II tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025*

IK ini memiliki frekuensi pengukuran capaian tahunan sehingga pada triwulan II tahun 2024 dan 2025 tidak dapat dibandingkan capaiannya.

3. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi*

a. Analisis Keberhasilan

Keberhasilan diupayakan melalui kelengkapan dokumen dan setiap perubahan diikuti dengan perubahan dokumen perencanaan maupun dokumen monitoring evaluasi. Penyesuaian dokumen tersebut disesuaikan untuk menjamin akuntabilitas kinerja LPSPL Sorong.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pada Triwulan II Tahun 2025 belum terdapat kendala dalam progress pencapaian indikator kinerja ini, karena semua dokumen telah dipenuhi.

c. Solusi

Pada triwulan II tahun 2025 belum terdapat kendala sehingga belum terdapat solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 6

LPSPL Sorong melakukan pemenuhan dokumen pendukung PM SAKIP diantaranya Perjanjian Kinerja, Rincian Target, Manual IKU, Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja Triwulan II serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja LPSPL Sorong secara berkala disetiap bulan melalui rapat bulanan.



Gambar 3.8 Dokumentasi pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja LPSPL Sorong setiap bulan

5. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Pada triwulan III akan dilaksanakan verifikasi data capaian kinerja triwulan III tahun 2025, penyusunan laporan kinerja triwulan III tahun 2025 dan melakukan monitoring evaluasi bulanan.

3.7.2. IK 8 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Indikator tersebut antara lain Revisi DIPA (10%), Deviasi Halaman III DIPA (10%), Data Kontrak (10%), Penyelesaian Tagihan (10%), Pengelolaan UP dan TUP (10%), Dispensasi SPM (5%), Penyerapan Anggaran (20%), dan Capaian Output (25%).

Cara hitung IK ini menggunakan rumus

$$\sum_{n=1}^7 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot} - \text{Dispensasi SPM}$$

Konversi bobot bernilai 100% apabila Satker/Eselon 1/K/L memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai. Konversi bobot bernilai dibawah 100% apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Tabel 3.10 Bobot Penilaian IKPA

No	Uraian Indikator IKPA	Bobot (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RPD	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Dispensasi SPM	(Pengurang Nilai IKPA)
8	Capaian Output	25

Tabel 3.11 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

SK.7	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong						
IKU.8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
97,97	83	85	83,89	98,69%	-	89	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. Capaian IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai) Triwulan II Tahun 2025

Target capaian IKPA pada triwulan II tahun 2025 adalah 85 sedangkan capaian IKPA pada triwulan II tahun 2025 adalah 83,89. Capaian tidak dapat melebihi target dikarenakan adanya penundaan pelaksanaan kegiatan Lautra sesuai dengan Surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Oceans for Prosperity Project, adanya blokir PNPB dan tidak adanya MP PNPB hingga akhir triwulan II. Hal ini membuat penyerapan anggaran tidak optimal dan memperbesar deviasi halaman III DIPA.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025

Triwulan II tahun 2024 LPSPL Sorong memiliki capaian 97.97 sedangkan pada Triwulan II tahun 2025 capaiannya adalah 83,89. Terjadi penurunan nilai IKPA sebesar

14,08. Hal ini disebabkan karena adanya penundaan pelaksanaan anggaran dan kegiatan yang bersumber dari PHLN yang diketahui melalui Surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Oceans for Prosperity Project. Sehingga proses penyerapan anggaran tertunda. Selain itu hingga Mei 2025 terdapat blokir PNPB. Pembukaan blokir PNPB baru dilakukan pada Juni 2025 dan hingga akhir Juni 2025 tidak terdapat Maksimum Pencairan PNPB.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong memiliki komitmen untuk memperbaiki kualitas perencanaan anggaran melalui pelaksanaan revisi DIPA; menjaga kualitas pelaksanaan anggaran melalui monitoring penyerapan anggaran setiap bulan, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP-TUP dan dispensasi SPM serta berusaha meningkatkan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memaksimalkan capaian output. LPSPL Sorong secara rutin melakukan monitoring capaian output dengan perencanaan dan realisasi anggaran setiap bulannya melalui rapat bulanan.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tantangan terhadap pelaksanaan IK ini adalah adanya surat instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja. Selain itu terdapat pendanaan/pencairan anggaran kegiatan yang bersumber dari PHLN untuk project Lautra hingga Juni 2025 berdasarkan surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Oceans for Prosperity Project dan selain itu terdapat blokir penggunaan PNPB hingga Juni 2025 serta hingga akhir Triwulan II tidak terdapat MP PNPB. Hal ini mengakibatkan proses penyerapan anggaran tertunda. Oleh karena itu disarankan agar LPSPL Sorong dapat melakukan revisi halaman III DIPA. Kendala TW II lainnya dalam pencapaian target nilai IKPA adalah ketidaktepatan waktu dalam pengelolaan UP/TUP, karena sempat

terkendala pada proses TTE pada aplikasi SAKTI, sehingga penyelesaian pengelolaan UP/TUP tertunda beberapa hari dan tanggal jatuh tempo.

c. Solusi

LPSP Sorong melakukan monitoring secara berkala terkait deviasi halaman III DIPA dan melakukan revisi halaman III DIPA secara periodik. Selain itu perlu dilakukan koordinasi terkait MP PNB. LPSP Sorong berkomitmen dalam melakukan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan serta tidak terlambat dalam pertanggungjawaban UP TUP.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 7

LPSP Sorong melakukan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulan serta monitoring update nilai kinerja anggaran pada aplikasi DJA SMART. Secara rutin nilai kinerja anggaran disampaikan pada rapat bulanan.

5. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Pada triwulan III akan dilakukan pengisian capaian output pada aplikasi SAKTI, melakukan revisi POK dan halaman III DIPA untuk acuan pelaksanaan kegiatan pada triwulan III.

3.7.3. IK 9 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN DJPKRL LINGKUP LPSP SORONG (NILAI)

Penilaian kinerja anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai kinerja anggaran. Penilaian kinerja perencanaan anggaran untuk Kementerian/Lembaga dilakukan terhadap:

1. Kinerja anggaran tingkat Satker;
2. Kinerja anggaran tingkat Unit Eselon I; dan
3. Kinerja anggaran tingkat Kementerian/Lembaga.

Proses penilaian kinerja perencanaan anggaran dimulai dengan tahapan (1) pengukuran variabel kinerja perencanaan anggaran berdasarkan data yang diperoleh dari sistem informasi dan dilanjutkan dengan (2) perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran pada setiap tingkatan. Adapun variabel kinerja perencanaan anggaran yang diukur, terdiri atas:

1. Variabel Efektivitas

Efektivitas penggunaan anggaran diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja sasaran strategis untuk level Kementerian/Lembaga yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari;
 2. Capaian indikator kinerja program untuk level Unit Eselon I yang dilaporkan setelah tahun anggaran berakhir paling lambat akhir Februari;
 3. Capaian RO untuk level Satker yang dilaporkan secara berkala mengikuti ketentuan pelaporan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
 4. Variabel Efisiensi;
2. Efisiensi penggunaan anggaran diukur melalui indikator yang meliputi:
1. Penggunaan SBK; dan/atau
 2. Efisiensi SBK.

Dalam rangka meningkatkan kualitas data capaian kinerja Kementerian/Lembaga yang dilaporkan melalui sistem informasi, dilakukan pengisian informasi data pra-pelaporan meliputi :

1. Manual indikator kinerja sasaran strategis

Pengisian manual indikator kinerja sasaran strategis dilakukan di tingkat Kementerian/Lembaga. Pengisian manual indikator dilakukan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan indikator kinerja sasaran strategis, pengisian manual indikator dapat diperbarui pada tanggal 1 Januari hingga akhir Februari tahun anggaran berikutnya hanya untuk indikator yang berubah/bertambah. Informasi yang diisikan dalam manual indikator kinerja sasaran strategis, antara lain:

1. Definisi indikator kinerja sasaran strategis;
2. Formula perhitungan capaian indikator;
3. Tujuan;
4. Tingkat kendali;
5. Tingkat validitas indikator;
6. Polarisasi capaian;
7. Instansi penyedia data;
8. Sumber/aplikasi/media data;
9. Waktu data tersedia;

10. Periode pelaporan; dan/atau

11. Keterkaitan dengan indikator RPJMN/RKP.

2. Manual indikator kinerja program

Pengisian manual indikator kinerja program dilakukan di tingkat Unit Eselon I. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan indikator kinerja program, pengisian manual indikator dapat diperbarui pada tanggal 1 Januari hingga akhir Februari tahun anggaran berikutnya hanya untuk indikator yang berubah/bertambah. Informasi yang diisikan dalam manual indikator kinerja program, antara lain:

1. Definisi indikator kinerja program;
2. Formula perhitungan capaian indikator;
3. Tujuan;
4. Tingkat kendali;
5. Tingkat validitas indikator;
6. Polarisasi capaian;
7. Instansi penyedia data;
8. Sumber/aplikasi/media data;
9. Waktu data tersedia;
10. Periode pelaporan; dan/atau
11. Keterkaitan dengan indikator RPJMN/RKP.

3. Manual RO berdasarkan referensi yang telah disediakan

Pengisian manual RO dilakukan di tingkat Unit Eselon I. Pengisian manual RO dilakukan sejak awal tahun anggaran sebagai prasyarat pelaporan capaian RO tahun anggaran berjalan. Manual RO dapat diperbarui apabila terdapat perubahan nomenklatur RO, perubahan satuan atau penambahan RO baru. Adapun referensi manual RO antara lain:

1. Statis/dinamis;
2. Cara pelaporan;
3. Polarisasi capaian; dan/atau
4. Polarisasi waktu.

Pengukuran indikator kinerja perencanaan anggaran merupakan proses untuk menghasilkan nilai capaian setiap indikator. Pedoman ini akan mengatur pengukuran indikator kinerja perencanaan anggaran sebagai berikut:

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker

Pengukuran kinerja perencanaan anggaran tingkat Satker dihitung dengan variabel sebagai berikut:

Efektivitas

Capaian RO

Pengukuran Capaian RO dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$CRO = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{RVRO_i}{TVRO_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CRO : Capaian RO tingkat Satker

RVRO_i : Realisasi Volume RO i

TVRO_i : Target Volume RO i

n : Jumlah RO

Efisiensi

Penggunaan SBK Indikator Penggunaan SBK dilakukan dengan membandingkan jumlah RO yang menggunakan SBKK dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang telah ditetapkan menjadi SBKK serta jumlah RO yang menggunakan standar biaya keluaran umum (SBKU) dalam RKA-K/L dibandingkan dengan jumlah RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU.

RO yang menggunakan SBKK merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKK yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKK meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

RO yang menggunakan SBKU merupakan RO dimana perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut kurang dari atau sama dengan indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK. Terhadap RO SBKU yang telah memiliki ijin prinsip pelampauan dari Menteri Keuangan, akan tetap dianggap menggunakan SBKU meskipun perbandingan antara penyerapan dengan RVRO pada RO tersebut melebihi indeks yang telah ditetapkan dalam PMK SBK.

Pengukuran Indikator penggunaan SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

Penggunaan SBK

$$= \left(\frac{\sum RO SBKK + \sum ROSBKU}{\sum RO SBKK \text{ dalam PMK} + \sum RO \text{ memenuhi kriteria SBKU}} \right) \times 100\%$$

PPKA Perencanaan Anggaran K/L yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran berjalan salah satunya dapat mengidentifikasi RO yang memenuhi kriteria untuk menggunakan SBKU sebagai salah satu dasar penilaian kinerja penggunaan SBK.

Efisiensi SBK

Efisiensi SBK diukur dengan membandingkan hasil pengurangan antara indeks RO SBK dengan indeks realisasi per RO SBK dengan indeks RO SBK. Pengukuran Efisiensi SBK dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$E_{SBK} = \left(\left(\sum_{i=1}^n \frac{\text{Indeks SBK}_i - \text{Indeks RA SBK}_i}{\text{Indeks SBK}_i} \right) \times \frac{1}{n} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

ESBK : Efisiensi SBK tingkat Satuan Kerja

Indeks RA SBK_i : Indeks Realisasi RO i SBK

n : Jumlah RO SBK

Dalam rangka penilaian kinerja perencanaan anggaran, efisiensi SBK perlu dikonversi agar menjadi skala nilai antara 0% (nol persen) sampai dengan 100% (seratus persen), dengan formula sebagai berikut:

$$NE_{SBK} = \frac{E_{SBK}}{20\%} \times 100\%$$

Keterangan

NESBK : Nilai Efisiensi SBK

ESBK : Efisiensi SBK

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satker

Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Satker sebagai berikut:

Tabel 3.12 Tabel Bobot Nilai Kinerja Anggaran Tingkat Satker

Variabel	Indikator	Bobot
Efektivitas 75	1. Capaian RO	75
Efisiensi 25	1. Penggunaan SBK	10
	2. Efisiensi SBK	15

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat Satker menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{NKA Satker} = (\text{CRO} \times \text{WCRO}) + (\text{PenggunaanSBK} \times \text{WPenggunaanSBK}) + (\text{NEAlokasi} \times \text{WEAlokasi})$$

Keterangan

NKA Satker : Nilai Kinerja Anggaran Satker

CRO : Capaian RO

PenggunaanSBK : Penggunaan SBK

NEAlokasi : Nilai Efisiensi Alokasi

WCRO : Bobot Capaian RO

WPenggunaanSBK : Bobot Penggunaan SBK

WEAlokasi : Bobot Efisiensi Alokasi

Kategori Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Untuk mempermudah interpretasi terhadap hasil perhitungan nilai kinerja perencanaan anggaran, nilai kinerja perencanaan anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

1. Kategori Sangat Baik, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 90 (sembilan puluh).
2. Kategori Baik, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 80 (delapan puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh).
3. Kategori Cukup, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 60 (enam puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh).
4. Kategori Kurang, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran lebih dari 50 (limapuluh) sampai dengan 60 (enam puluh).
5. Kategori Sangat Kurang, untuk nilai kinerja perencanaan anggaran sampai dengan 50 (lima puluh)

Tabel 3.13 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup Lpspl Sorong (Nilai)

SK.7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)						
IKU.9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Djpkrl Lingkup Lpspl Sorong (Nilai)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	71,5	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan II tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025

Periode pengukuran capaian indikator kinerja ini adalah tahunan sehingga triwulan II tahun 2024 dan triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan capaiannya.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong secara rutin mengontrol realisasi anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan dan mengisi secara bertahap capaian pada aplikasi SAKTI. SDM LPSPL Sorong juga telah mengikuti bimbingan teknis terkait mengelola aplikasi SMART DJA. Selain itu setiap triwulan LPSPL melakukan revisi atau penyesuaian halaman III DIPA untuk meningkatkan nilai pelaksanaan anggaran.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tantangan terhadap pelaksanaan IK ini adalah adanya surat instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang entang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja. Selain itu terdapat pendanaan pencairan anggaran kegiatan yang bersumber dari PHLN untuk project Lautra hingga Juni 2025 berdasarkan surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Oceans for Prosperity Project dan selain itu terdapat blokir penggunaan PNBPN hingga Juni 2025 serta hingga akhir Triwulan II tidak terdapat MP PNBPN. Hal ini mengakibatkan proses penyerapan anggaran tertunda. Oleh karena itu disarankan agar LPSPL Sorong dapat melakukan revisi halaman III DIPA.

c. Solusi

LPSPL Sorong dapat melakukan revisi halaman III DIPA dan pemantauan DIPA secara berkala untuk menyesuaikan ketersediaan anggaran yang dapat digunakan.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 9

LPSPL Sorong melakukan penginputan capaian output pada aplikasi SAKTI setiap bulan serta monitoring update nilai kinerja anggaran pada aplikasi DJA SMART. Secara rutin nilai kinerja anggaran disampaikan pada rapat bulanan.

5. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Pada triwulan III akan dilakukan penginputan capaian rincian output pada aplikasi SAKTI dan melakukan revisi atau penyesuaian halaman III DIPA.

3.7.4. IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan I Tahun 2025. Cara penghitungan Indikator kinerja ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen laporan SPIP triwulan yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

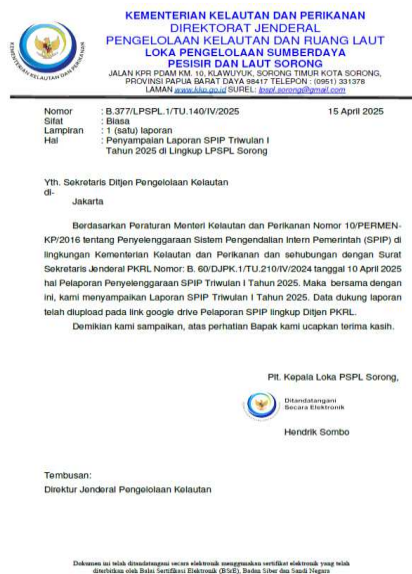
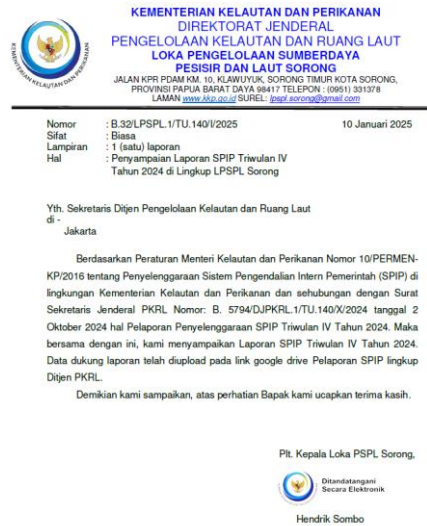
Tabel 3.14 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)

SK.7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)						
IKU.10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Djpkrl Lingkup Lpspl Sorong (Nilai)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
2	2	2	2	100%	-	4	2

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. Capaian IK Indeks Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen) Triwulan II Tahun 2025

Indikator kinerja ini pada triwulan II tahun 2025 telah tercapai 2 dokumen atau capaiannya 100% yaitu dokumen SPIP triwulan IV tahun 2024 dan SPIP triwulan I tahun 2025. Capaian ini telah disampaikan ke Direktorat Jenderal PRL dengan surat nomor: B.32/LPSPL.1/TU.140/I/2025 tanggal 10 Januari 2025 perihal Penyampaian SPIP Triwulan IV Tahun 2024 dan surat nomor B.377/LPSPL.1/TU.140/IV/2025 tanggal 15 April 2025 April perihal penyampaian SPIP Triwulan I Tahun 2025.



Gambar 3.9 Tangkapan Layar Surat Penyampaian dan Laporan SPIP TW IV tahun 2024 dan SPIP TW I Tahun 2025

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian Indeks Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen) triwulan II tahun 2025 adalah 2 dokumen dan capaian IK ini pada triwulan II tahun 2024 adalah 2 dokumen sehingga capaian kinerja triwulan II tahun 2024 dan 2025 adalah sama.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong melakukan penyusunan laporan SPIP secara rutin bulanan dan triwulanan sehingga selalu tersedia data dan informasi pengendalian terupdate.

Selain itu pemenuhan dokumen SPIP terupdate didukung adanya kerjasama dari SDM sesuai tugasnya masing-masing.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak ada kendala pada pencapaian target indikator ini, kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila tidak ada kerjasama dan komitmen SDM untuk selalu menyediakan data dan informasi organisasi terupdate untuk kebutuhan pengendalian.

c. Solusi

Untuk menghindari kegagalan dalam menyusun dokumen SPIP, maka diperlukan koordinasi dan kerjasama dari beberapa pegawai yang memiliki tugas terkait penyusunan dokumen SPIP.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 9

Kegiatan pendukung pencapaian Indikator Kinerja ini pada triwulan II adalah penyusunan laporan SPIP TW I Tahun 2025.

5. Rencana Aksi Triwulan III TA 2025

Pada triwulan III tahun 2025 akan dilakukan penyusunan SPIP triwulan II tahun 2025 dan SPIP rutin bulanan.

3.7.5. IK 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Penghitungan indikator kinerja ini dilakukan dengan cara

$$\begin{aligned} IP &= \sum_{i=1}^4 IP_i \\ &= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4 \end{aligned}$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_2 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_3 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_4 = W_{4m} * R_{4m}$$

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

$W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

$W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

$W_{3l} * R_{3l}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

$W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Tabel 3.15 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)

SK.7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong						
IKU.10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW I tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
89,82	83	78	83,67	107,27	-	80	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks) Tahun 2025

Berdasarkan tautan IP ASN pada <http://ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/eselon> bahwa indeks profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong sampai dengan triwulan II yaitu 83,67. Periode pencapaian target dan periode pelaporan capaian IK ini adalah semesteran dengan target semester I adalah 78 dan target semester II adalah 80, sehingga pada semester I untuk indikator kinerja ini capaiannya 107,27% dari target semester I.

Silakan ketik Nama Unit Ker. Cari

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Dihitung	Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase	IP	Prosentase		
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN	46	23.04	92.16 %	27.14	67.85 %	24.67	82.23 %	5	100 %	79.85	SEDANG
2	DIREKTORAT KONSERVASI EKOSISTEM	30	22.67	90.68 %	28.69	71.73 %	25	83.33 %	5	100 %	81.36	TINGGI
3	DIREKTORAT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK	31	23.39	93.56 %	26.71	66.78 %	25	83.33 %	5	100 %	80.1	SEDANG
4	DIREKTORAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	47	23.3	93.2 %	27.64	69.1 %	25.85	86.17 %	5	100 %	81.79	TINGGI
5	DIREKTORAT JASA BAHARI	31	23.71	94.84 %	28.69	71.73 %	26.29	87.63 %	5	100 %	83.69	TINGGI
6	DIREKTORAT SUMBER DAYA KELAUTAN	39	22.95	91.8 %	29.51	73.78 %	26.41	88.03 %	5	100 %	83.87	TINGGI
7	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PADANG	57	21.58	86.32 %	33.96	84.9 %	27.28	90.93 %	5	100 %	87.82	TINGGI
8	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT PONTIANAK	50	21.7	86.8 %	33.46	83.65 %	24.8	82.67 %	5	100 %	84.96	TINGGI
9	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT MAKASSAR	51	22.25	89 %	34.9	87.25 %	27.94	93.13 %	5	100 %	90.1	TINGGI
10	BALAI PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT DENPASAR	51	21.76	87.04 %	30.97	77.42 %	25.98	86.6 %	5	100 %	83.71	TINGGI
11	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SORONG	30	21.5	86 %	32	80 %	25.17	83.9 %	5	100 %	83.67	TINGGI
12	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG	50	21.2	84.8 %	30.86	77.15 %	26.1	87 %	4.92	98.4 %	83.08	TINGGI
13	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	40	22	88 %	36.06	90.15 %	27.62	92.07 %	5	100 %	90.68	TINGGI
14	LOKA PENGELOLAAN SD PESISIR & LAUT SERANG	52	22.6	90.4 %	30.05	75.13 %	27.6	92 %	5	100 %	85.24	TINGGI

Gambar Gambar 3.10 Screenshot Penilaian IP ASN Triwulan II tahun 2025

Sumber : <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025>

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025

Capaian kinerja IP ASN LPSPL Sorong triwulan II atau semester I tahun 2024 yaitu 89,82 sedangkan capaian pada semester I tahun 2025 yaitu 83,67. Hal ini menunjukkan bahwa IP ASN LPSPL Sorong pada semester I tahun 2025 lebih rendah dibandingkan IP ASN pada semester I tahun 2024. Hal ini disebabkan karena banyak pegawai LPSPL Sorong pada predikat kinerja pada tahun 2024 memiliki nilai Sangat Baik sebanyak 22 orang dan predikat Baik sebanyak 6 orang sedangkan pada tahun 2025 pegawai cenderung memiliki nilai baik, pegawai yang mendapatkan nilai Baik sebanyak 29 orang dan Sangat Baik sebanyak 1 orang.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

1. Kualifikasi: tingkat Pendidikan ASN LPSPL Sorong meningkat setiap tahunnya melalui tugas belajar maupun ijin belajar.
2. Kompetensi: masing-masing ASN LPSPL Sorong memiliki kompetensi beranekaragam yang didapatkan dari Bimtek/Webinar/Workshop/Seminar/Diklat. Kompetensi tersebut diakui dengan penerbitan sertifikat atas kegiatan peningkatan kompetensi yang diikuti dengan minimal pembelajaran 20 jam pembelajaran (JP).

3. Kinerja: pengisian sasaran kinerja pegawai (SKP) secara individu sudah menggunakan SKP online, sehingga sudah ada rincian target kinerja yang harus dicapai masing-masing individu dalam jangka waktu tertentu.
4. Disiplin: tingkat kehadiran individu telah di monitoring secara berkala oleh kepegawaian sehingga meningkatkan nilai pada indikator ini.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak terdapat kendala dalam mencapai indikator ini, namun pegawai yang telah mengikuti bimbingan teknis/workshop/seminar ada yang belum mengupdate sertifikatnya pada MyASN.

c. Solusi

Kepegawaian LPSPL Sorong melakukan monitoring secara berkala dan memberikan himbauan kepada pegawai LPSPL Sorong untuk update data peningkatan kapasitas di MyASN.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 10

Kegiatan pendukung pelaksanaan Indikator Kinerja ini adalah pegawai LPSPL Sorong telah mengikuti kegiatan pelatihan, bimtek dan/atau seminar serta mengunggah data dukungnya di portal MyASN, pengusulan pencantuman gelar dan penilaian kinerja pegawai.

Rencana Aksi Triwulan III TA 2025

Pada triwulan III tahun 2025, pegawai LPSPL Sorong secara mandiri maupun ditugaskan untuk mengikuti kegiatan bimbingan teknis/seminar/workshop. Serta melakukan penginputan sertifikat kompetensi pelatihan secara mandiri oleh masing-masing pegawai untuk mendukung IP ASN pada dimensi kompetensi. Bagian kepegawaian akan melakukan monitoring secara berkala melalui WA grup bagi pegawai yang belum menginput data sertifikat pada e-pegawai. Masing-masing pegawai akan mulai mengupload Sertifikat Pelatihan Bimtek/Seminar/Workshop pada aplikasi MyASN dan pengisian arsip sertifikat secara mandiri pada gdrive yang disiapkan oleh bagian kepegawaian. Kepegawaian LPSPL Sorong juga melakukan share informasi terkait kegiatan bimtek maupun seminar.

3.7.6. IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2024 s.d. 30 September 2025 atau Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh LPSPL Sorong. Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti LPSPL Sorong}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada LPSPL Sorong}} \times 100$$

Tabel 3.16 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)

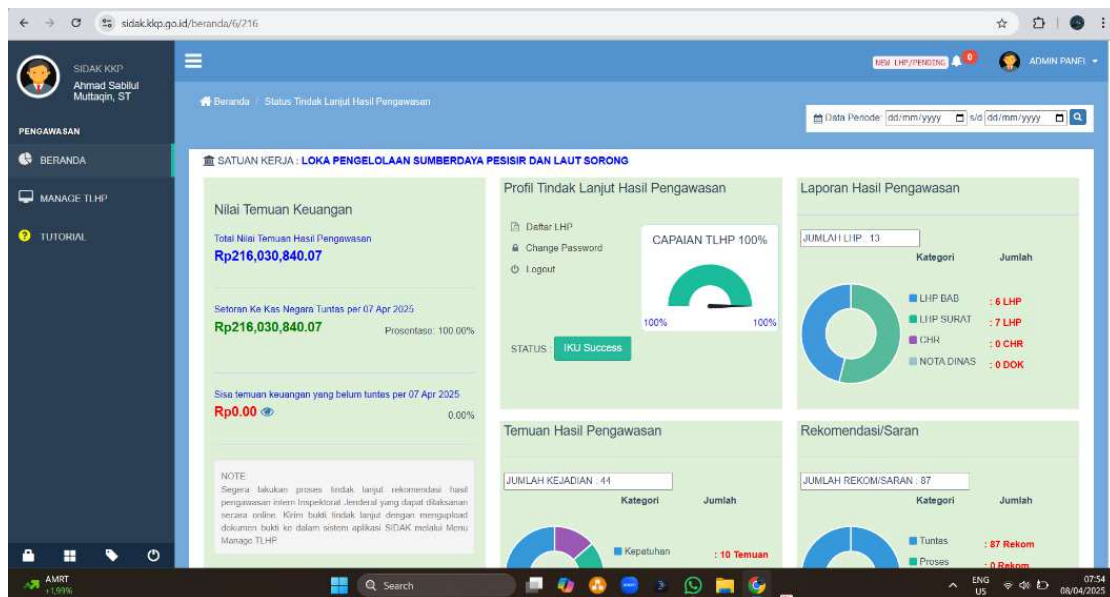
SK.7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong						
IKU.12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
100	85	95	100	105,26%	-	95	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%) Tahun 2025

Berdasarkan laman SIDAK yang dikelola Inspektorat Jenderal KKP (<http://sidak.kkp.go.id/hasil-pengawasan/6/216>) dan surat Inspektorat Jenderal KKP Nomor: B.108/ITJ.1/HP.510/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 perihal Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal s.d Triwulan I Tahun 2025 lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan, LPSPL Sorong telah menindaklanjuti 3 dari 3 rekomendasi sehingga capaian IKM persentase rekomendasi hasil pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) Triwulan I Tahun 2025 adalah 100%. Hal ini juga didukung oleh surat penyampaian Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.1131/DJPK.1/TU.210/VII/2025 tanggal 11 Juli 2025 tentang Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK Triwulan II Tahun 2025" nilai

capaian LPSPL Sorong untuk Indikator kinerja ini adalah 100%. Persentase capaian TW II terhadap target TW II sebesar 105,26%.



Gambar 3.11 Screenshot aplikasi SIDAK KKP
Sumber : sidak.kkp.go.id tanggal 1 Juli 2025

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025*

Periode pencapaian dan pelaporan indikator kinerja ini pada tahun 2024 dan 2025 yaitu triwulanan. Target indikator kinerja ini pada tahun triwulan II tahun 2024 yaitu 80 sedangkan pada triwulan II tahun 2025 yaitu 95. Capaian pada pada triwulan II tahun 2024 dan triwulan II tahun 2025 yaitu sama pada nilai 100%.

3. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi*

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong selalu memonitoring secara rutin/berkala semua rekomendasi yang dikeluarkan oleh Itjen sehingga selalu ada progress tindaklanjut pada aplikasi SIDAK. Setiap pegawai yang terkait dengan rekomendasi yang dikeluarkan tersebut memiliki tanggungjawab masing-masing dengan fungsi kontrol dari Kepala LPSPL Sorong.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tidak ada kendala pada pencapaian target indikator ini, kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila tidak ada koordinasi dan komitmen organisasi untuk memperbaiki kinerja organisasi berdasarkan rekomendasi yang telah ada.

c. Solusi

Belum terdapat solusi yang dilakukan karena tidak ada kendala yang menyebabkan kegagalan. Untuk mengantisipasi atau meminimalisir kegagalan agar dilakukan koordinasi antar pegawai dalam menyelesaikan rekomendasi yang ada.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 11

LPSPL Sorong telah melakukan pemantauan aplikasi SIDAK untuk memperhatikan hasil pengawasan Itjen KKP.

5. Rencana Aksi Triwulan III TA 2025

Pada triwulan III tahun 2025, LPSPL Sorong melakukan monitoring aplikasi SIDAK secara berkala, serta akan menindaklanjuti jika terdapat rekomendasi yang terbit pada triwulan II tahun 2025.

3.7.7. IK 13 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)

Temuan LHP BPK LPSPL Sorong yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LK LPSPL Sorong Tahun 2025.

Cara menghitung IK ini dilakukan dengan rumus

$$\frac{\text{Jumlah Temuan LHP BPK LPSPL Sorong yang diselesaikan}}{\text{Jumlah temuan dalam LHP BPK LPSPL Sorong}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan **capaian adalah sama dengan target**.

Contoh:

Target = 100

Tidak dilakukan audit oleh BPK, maka yang dituliskan capaian pada kinerjaku adalah 100.

Tabel 3.17 Capaian IK 13 Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup LPSPL Sorong (%)

SK.7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong						
IK.13	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW II	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	100	-	-	-	-	100	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. *Capaian IK Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup LPSPL Sorong (%) Triwulan I Tahun 2025*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan I tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerja triwulan II tahun 2024 dengan triwulan II tahun 2025.

3. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi*

a. Analisis Keberhasilan.

LPSPL Sorong segera menindaklanjuti permintaan dokumen dan menyelesaikan temuan dari BPK. Segala tindak lanjut yang dilaksanakan LPSPL Sorong disampaikan secara resmi dan berjenjang.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pada triwulan II tahun 2025 belum terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini, namun kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila organisasi tidak kooperatif menindaklanjuti temuan BPK.

c. Solusi

Belum terdapat solusi karena tidak terdapat kendala dalam pencapaian indikator kinerja ini.

4. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 12*

LPSPL Sorong mengikuti pelaksanaan pemeriksaan BPK terkait pelaksanaan kegiatan Ocean Prosperity Project yang dilaksanakan pada tahun 2024 yang dilakukan terhadap Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

5. *Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025*

LPSPL akan melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan BPK jika terdapat hasil pemeriksaan pada triwulan III tahun 2025.

3.7.8. IK 14 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Standar penilaian antara lain:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Cara perhitungan indikator ini adalah Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (inspektorat V) dan/atau inspektorat mitra DJPKRL dan/atau tim pembangunan zona integritas DJPKRL. Jika pada tahun anggaran berjalan tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian yang digunakan adalah capaian nilai WBK tahun sebelumnya.

Tabel 3.49 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

SK.7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong						
IKU.14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	75	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. Capaian IKM Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan lingkup LPSPL Sorong yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%) Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan II tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerja triwulan I tahun 2024 dengan triwulan I tahun 2025.

3. Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong memiliki 6 (enam) kelompok kerja yang tertuang pada surat tugas Kepala LPSPL Sorong Nomor: SP.70/LPSPL.1/TU.110/II/2025, yang selalu memonitor pelaksanaan kinerja organisasi dalam rangka mencapai predikat WBK sehingga masing-masing komponen penilaian dapat dimonitoring kemajuannya.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Kegagalan mencapai target dapat terjadi apabila tidak ada dokumen terkait proses terbentuknya predikat WBK di organisasi LPSPL Sorong, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang setiap tahapannya harus didokumentasikan dan diarsipkan. Jumlah SDM LPSPL Sorong yang setiap tahunnya berkurang juga membuat tidak maksimalnya pencapaian nilai WBK.

c. Solusi

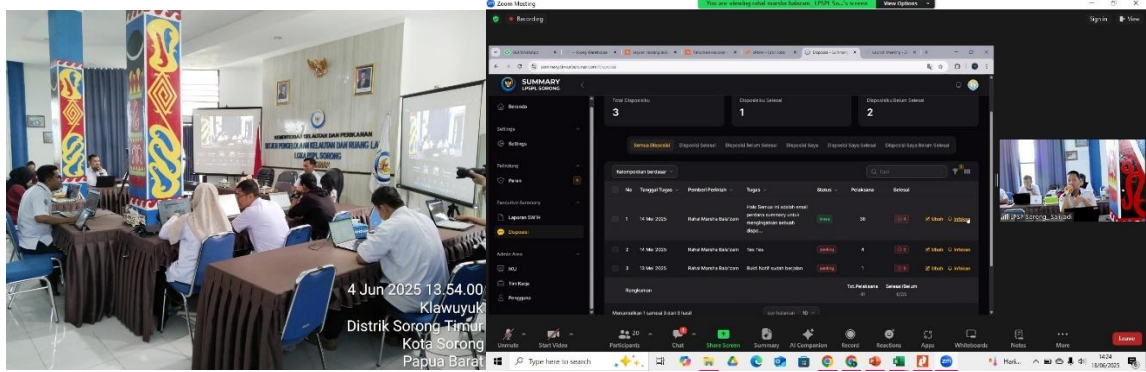
LPSPL Sorong melakukan pertemuan setiap minggu pada hari rabu dengan seluruh pegawai untuk monitoring status kelengkapan dokumen WBK, sekretaris pembangunan zona integritas memantau dan menghimbau agar setiap kelompok kerja melengkapi dokumen yang belum tersedia, serta mengupdate persentase pemenuhan dokumen yang telah disusun dan diupload.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 13

Triwulan II Tahun 2025, LPSPL Sorong melakukan monitoring mingguan pembangunan WBK lingkup LPSPL Sorong, pemenuhan dokumen WBK WBBM dan monitoring evaluasi Pembangunan WBK.

5. Rencana Aksi Triwulan III TA 2025

Pada triwulan III tahun 2025 akan dilaksanakan pemenuhan dokumen secara berkala, monitoring kelengkapan dokumen dan menyampaikan persentase pemenuhan dokumen yang telah disusun dan diupload.



Gambar 3.12 Rapat Mingguan Pembangunan WBK WBBM Lingkup LPSPL Sorong

3.7.9. IK 15 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

- a. Pengawasan system kearsipan internal
 - Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
 - Sumber daya kearsipan yang meliputi
- b. Pengawasan pengelolaan arsip aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

- c. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Formula perhitungan Indikator Ini antara lain

1. Nilai pengawasan kearsipan internal LPSPL Sorong akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.

2. Nilai pengawasan kearsipan internal LPSPL Sorong merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:

a. Aspek pengelolaan arsip dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Penciptaan Arsip
- Penggunaan Arsip
- Pemeliharaan Arsip
- Penyusutan Arsip

i. Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

b. Aspek sumberdaya kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:

- Sumberdaya Manusia Kearsipan
- Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.

3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:

Kategori Interval Skor

AA Sangat Memuaskan > 90 – 100

A Memuaskan > 80 – 90

BB Sangat Baik > 70 – 80

B Baik > 60 – 70

CC Cukup > 50 – 60

C Kurang > 30 – 50

D Sangat Kurang 0 – 30

Tabel 3.18 Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

SK.7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong						
IKU.15	Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW II	Target 2024	Target TW I	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	80	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 30 Juni 2025

1. *Capaian IK Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) Triwulan II Tahun 2025*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan II tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dan Triwulan I Tahun 2025*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan II tahun 2024 dan triwulan II tahun 2025 tidak dapat dibandingkan.

3. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi*

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong melakukan telaah terhadap lembar kerja evaluasi (LKE) untuk penilaian indikator kinerja ini serta memenuhi hal-hal yang digunakan untuk menjawab lembar kerja evaluasi tersebut.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Pada triwulan II tahun 2025 belum terdapat kendala dalam mencapai target indikator kinerja ini.

c. Solusi

Belum terdapat solusi yang dilakukan karena tidak ada kendala pencapaian indikator ini.

4. *Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IKM 20*

Triwulan II tahun 2025 LPSPL Sorong telah melaksanakan Rapat evaluasi dan target kearsipan lingkup DJPKRL tahun 2025, Sosialisasi Pelatihan Kearsipan Tahun 2025, Rapat Pembahasan Program Kegiatan Kearsipan Tahun 2025, Sosialisasi Sertifikasi SDM Kearsipan Tahun 2025, penilaian internal kearsipan tahun 2025 dan pembangunan system kearsipan LPSPL Sorong "Si Panda".

5. *Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025*

Pada triwulan III tahun 2025 akan melaksanakan evaluasi pengarsipan tahun 2024, penyusunan target kearsipan tahun 2025, penataan arsip aktif di unit pengolah dan pemberkasan arsip aktif pada aplikasi portal.

3.7.10. IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Pengisian data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada triwulan berikutnya. Formula perhitungan capaian indikator ini adalah Persentase RUP PBJ yang diumumkan di

SIRUP =

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Tabel 3.19 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)

SK.7	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong						
IKU.16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)						
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	76	100	120	-	76	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 1 April 2025

1. *Capaian IK Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%) Triwulan II Tahun 2025*

Indikator kinerja ini memiliki capaian 100% pada triwulan II. Total Pagu pada kertas kerja klarifikasi LPSPL Sorong sebesar Rp18.247.019.000 dengan rekap RUP terumumkan pada aplikasi SIRUP pagu yang terumumkan sebesar Rp18.247.019.000 sesuai dengan surat penyampaian sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.1144/DJPK.1/TU.210/VII/2025 tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Ditjen PKRL yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025 dan nota dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor : 86/SJ.7/PL.410/VII/2025 Tentang Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025.

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN (sumber data : Menu RUP - SIRUP)			PAGU TERUMUMKAN (sumber data : Rekap RUP Terumumkan - SIRUP)			% RUP TERUMUMKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Selisih Pagu Terumumkan - Pagu Pengadaan	%
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PKRL	107,606,599,000	50,284,466,000	157,891,065,000	104,954,305,000	51,309,757,000	156,264,062,000	(1,627,003,000)	98.97%
2	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BPSP PADANG	2,720,603,000	-	2,720,603,000	2,720,603,000	-	2,720,603,000	0	100.00%
3	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	2,916,231,000	-	2,916,231,000	2,916,231,000	-	2,916,231,000	0	100.00%
4	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	2,343,328,000	-	2,343,328,000	2,343,328,000	-	2,343,328,000	0	100.00%
5	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	14,676,457,000	-	14,676,457,000	14,676,457,000	-	14,676,457,000	0	100.00%
6	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	5,331,206,000	-	5,331,206,000	5,334,406,000	-	5,334,406,000	3,200,000	100.06%
7	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BIKPN KUPANG	26,318,377,000	-	26,318,377,000	26,318,377,000	-	26,318,377,000	0	100.00%
8	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	3,062,287,000	-	3,062,287,000	3,062,287,000	-	3,062,287,000	0	100.00%
9	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	18,247,019,000	-	18,247,019,000	19,268,986,000	-	19,268,986,000	1,021,967,000	105.60%

Gambar 3.13 Tangkapan layar persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan II tahun anggaran 2025

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025*

Indikator ini merupakan indikator baru yang ada pada tahun 2025 sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan triwulan II tahun 2024.

3. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi*

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong melakukan memiliki pegawai yang bersertifikat PBJ dan telah memahami menggunakan aplikasi SIRUP selain itu LPSPL Sorong juga memiliki hubungan yang baik dengan Pejabat Pengadaan eksternal sehingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan efektif.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tantangan terhadap pelaksanaan IK ini adalah adanya surat instruksi presiden nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja. Selain itu terdapat Surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) *Oceans for Prosperity Project*. Sehingga proses pengadaan tertunda.

c. Solusi

LPSPL Sorong dapat berkonsultasi dengan Setdijen DJPKRL terkait kondisi anggaran yang dapat digunakan dan menyesuaikan mekanisme pengadaan sesuai dengan kondisi anggaran yang ada.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 15

Triwulan II LPSPL Sorong melaksanakan penyusunan RUP dan Kertas Kerja pengadaan

5. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Pada triwulan III tahun 2025 LPSPL Sorong akan melaksanakan penyusunan RUP dan Kertas Kerja pengadaan.

3.7.11. IK 17 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai) adalah hasil evaluasi Terhadap Pelaksanaan keterbukaan informasi publik lingkup LPSPL Sorong yang menggambarkan nilai Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Komunikasi dengan Media dan Lembaga yang Optimal di Lingkup LPSPL Sorong.

Formula perhitungan indikator ini adalah Nilai diperoleh dari hasil pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat dengan formula perhitungan sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Adapun nilai keterbukaan informasi publik dan pelayanan komunikasi dengan media dan lembaga yang optimal lingkup LPSPL Sorong sesuai dengan kriteria:

- a. informatif dengan nilai 97-100;

- b. menuju informatif dengan nilai 80-96;
- c. cukup informatif dengan nilai 60-79;
- d. kurang informatif dengan nilai 40-59;
- e. tidak informatif dengan nilai <39.

Penilaian dilakukan berdasarkan lima aspek utama, yaitu Mengumumkan Informasi Publik, Menyediakan Dokumen Informasi, Sarana Prasarana, Kelembagaan, dan Digitalisasi, dengan masing-masing aspek memiliki sub-nilai yang berkontribusi terhadap total nilai keseluruhan. Bobot penilaian ditentukan berdasarkan persentase capaian dari masing-masing aspek, yang kemudian dihitung untuk memperoleh hasil akhir. Evaluasi difokuskan pada relevansi, akurasi, dan kekinian informasi yang dipublikasikan sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi. Setiap jawaban dalam kuesioner harus didukung dengan bukti pelaksanaan, yang dapat berupa tautan website, dokumen digital, atau soft file. Apabila terdapat aspek yang tidak relevan atau tidak tersedia, maka unit organisasi wajib memberikan keterangan sesuai petunjuk yang telah ditetapkan. Keterlambatan atau ketidaksempurnaan dalam penyediaan informasi akan berakibat pada pengurangan nilai.

Tabel 3.20 Bobot Penilaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik

NO	ASPEK YANG DINILAI	SUB NILAI	PERSENTASI	TOTAL	BOBOT	HASIL
TABULASI NILAI SAQ (Self Assessment Questionare)						
1	Mengumumkan Informasi public	15	60%	60	80%	80
2	Menyediakan Dokumen Informasi	25				
3	Sarana Prasarana	30				
4	Kelembagaan	20	40%	40		
5	Digitalisasi	10				
Jumlah		100	100%			
TABULASI NILAI PRESENTASI UJI INFORMASI PUBLIK						
1	Persentasi Publik	100	100%	100	20%	20
	Jumlah	100	100%	100		
TOTAL NILAI KESELURUHAN					100%	100

Bobot penilaian dalam keterbukaan informasi publik dihitung berdasarkan dua komponen utama, yaitu hasil pengisian *Self-Assessment Questionnaire* (SAQ) sebesar 80% dan presentasi informasi publik sebesar 20%. Penilaian dalam SAQ dilakukan dengan menilai lima aspek utama, yaitu Mengumumkan Informasi Publik, Menyediakan Dokumen Informasi, Sarana Prasarana, Kelembagaan, dan Digitalisasi, dengan total sub-nilai 100. Persentase capaian dari masing-masing aspek dihitung untuk menentukan skor akhir, yang kemudian dikalikan dengan bobot 80%. Dalam contoh tabel, persentase

ketercapaian adalah 60% untuk sebagian aspek dan 40% untuk aspek lainnya, menghasilkan nilai total 100. Bobot akhir dari pengisian SAQ sebesar 80% memberikan nilai 80. Selanjutnya, 20% sisanya diperoleh dari aspek presentasi informasi publik, sehingga total nilai keterbukaan informasi publik mencapai 100%. Dengan metode ini, evaluasi dilakukan secara menyeluruh, memastikan keseimbangan antara pengisian kuesioner dan kemampuan unit organisasi dalam mempresentasikan informasi publik secara langsung.

Tabel 3.21 Capaian IK 16 Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)

SK.7		Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong					
IKU.17		Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)					
Realisasi 2024		Tahun 2025					
TW II	Target 2024	Target TW II	Realisasi TW II	% Capaian	Kenaikan thd TW II tahun 2024	Target PK 2025	% Realisasi thd PK
-	-	-	-	-	-	95	-

Sumber Data: LPSPL Sorong, per 31 Maret 2024

1. *Capaian IK Nilai pengawasan internal kearsipan lingkup LPSPL Sorong (Nilai) Triwulan II Tahun 2025*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga triwulan II tahun 2025 tidak terdapat capaian.

2. *Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Triwulan II Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025*

IK ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan capaian triwulan II tahun 2024 dengan triwulan II tahun 2025.

3. *Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Kendala dan Solusi*

a. Analisis Keberhasilan

LPSPL Sorong memiliki tim PPID yang bertugas melaksanakan IK keterbukaan informasi publik sehingga IK ini dapat berjalan secara optimal. Selain itu LPSPL Sorong juga memiliki berbagai macam sosial media yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi publik kepada masyarakat.

b. Analisis Kegagalan/Kendala

Tantangan pelaksanaan IK ini adalah adanya penundaan pelaksanaan pengadaan lautra yang dilaksanakan berdasar Surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) *Oceans for Prosperity Project*. Sehingga informasi terkait pengadaan ini mengalami penundaan.

c. Solusi

Tim PPID LPSPL Sorong dapat berkoordinasi dengan pihak Sesditjen PKRL terkait kondisi anggaran lautra.

4. Kegiatan Pendukung Pencapaian Target IK 14

Triwulan II 2025, LPSPL Sorong aktif menerbitkan publikasi pelayanan publik berupa pelayanan jenis ikan dilindungi dan pelayanan pemanfaatan ruang laut.

5. Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2025

Pada triwulan II tahun 2025 LPSPL Sorong akan menerbitkan informasi terkait pelayanan public berupa pelayanan jenis ikan dilindungi dan informasi lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong.

3.8. Akuntabilitas Anggaran

Dalam rangka mendukung kinerja LPSPL Sorong pada tahun anggaran 2025, DIPA awal LPSPL Sorong tahun 2025 sebesar Rp40.227.209.000 yang bersumber dari Rupiah Murni Rp8,450,539,000,00; PNPB sebesar Rp1,625,000,000,00 dan Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp30,151,670,000,00 yang terbit pada tanggal 30 November 2024 dan sesuai dengan Perjanjian Kinerja antara LPSPL Sorong dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tanggal 24 Januari 2025. Hal ini juga sesuai dengan DIPA Petikan pagu definitif (pagu awal) tahun 2025 dengan Nomor: SP DIPA-032.07.2.477440/2025 tanggal 2 Desember 2024. Anggaran tersebut mendukung 3 (tiga) program yaitu program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp30,651,670,000,00, program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp1.125.000.000,00, dan program dukungan manajemen sebesar Rp8.450.539.000,00. Jika dijabarkan 3 program tersebut menjadi 4 kegiatan yaitu (1) Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan

Keanekaragaman Hayati Laut sebesar Rp30,651,670,000,00,00; (2) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp300,000,000,00; (3) Perencanaan Ruang Laut sebesar Rp825,000,000,00; dan (4) Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sebesar Rp8,450,539,000,00. Pada revisi DIPA 1 s.d 4 terdapat pemblokiran anggaran sebesar Rp10.502.610.000,00 yang terdapat pada belanja 52 sedangkan pada Revisi DIPA ke 5 tanggal 17 Juni 2025 dengan nomor SP DIPA-032.07.2.477440/2025 terdapat pembukaan blokir dana yang bersumber dari PNPB sebesar Rp882.895.000,00 sehingga total anggaran yang diblokir sebesar Rp 9.619.715.000,00. Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Rincian serapan anggaran LPSPL Sorong Per RO (Lampiran V) yaitu Rp 1,794,106,562 atau 4.46% dari anggaran Rp40,227,209,000.

Realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2025 berdasarkan aplikasi OMSPAN dan Rincian serapan anggaran LPSPL Sorong Per RO (Lampiran V) yaitu Rp 1,794,106,562 atau 4.46% dari anggaran Rp40,227,209,000 dengan gambaran sebagai berikut :

Tabel 3.22 Rincian Sumber Anggaran LPSPL Sorong Tahun 2025

Uraian	Tahun 2025		
	Anggaran	Realisasi	%
Sumber Anggaran Rupiah Murni			
Belanja Pegawai	5,400,000,000	2,329,556,684	43,14
Belanja Barang	3,050,539,000	970,901,876	31,83
Belanja Modal	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
TOTAL	8,450,539,000	3,300,458,560	39,06
Sumber Anggaran PNPB			
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	1,625,000,000	0	0
Belanja Modal	0	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
TOTAL	1,625,000,000	0	0
Sumber Anggaran PLN			
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	29,817,545,000	0	0
Belanja Modal	334,125,000	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
TOTAL	29,817,545,000	0	0
TOTAL AKUMULASI	40,227,209,000	3,300,458,560	8.20

Berdasarkan tabel (Tabel 3.22) tersebut dapat diketahui secara umum serapan LPSPL Sorong masih sangat rendah. Serapan terbesar berasal dana yang bersumber Rupiah Murni sebesar Rp3,300,458,560,00 dari belanja 51 dan belanja 52. Sementara itu anggaran yang berasal dari PNBPN dan Pinjaman Luar Negeri serapannya sebesar 0%. Tidak adanya serapan PNBPN disebabkan karena pada triwulan II anggaran tersebut terblokir dan baru dapat dilakukan buka blokir pada revisi POK ke 5 pada 17 Juni 2025 namun belum disertai dengan MP PNBPN. Anggaran yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri serapannya sebesar 0% disebabkan karena adanya penundaan pelaksanaan anggaran lautra berdasarkan Surat Penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Oceans for Prosperity Project.

Sementara itu berdasarkan rincian realisasi anggaran LPSPL Sorong per RO (lampiran V) diketahui bahwa serapan LPSPL Sorong sebesar 3,300,458,560 jika dihitung menggunakan pagu tanpa blokir serapannya sebesar 8,20%.

Realisasi anggaran pada masing-masing indikator yang terdapat pada Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong sebagai berikut (Tabel 3.23).

Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Per Indikator pada Perjanjian Kinerja

No	IKU	Kegiatan Pendukung		Pagu (Rp)	Pagu Efektif	Realisasi (Rp)	Blokir (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)	a	Lautra	29,817,545,000	22,132,831,000	0	7,684,714,000	22,132,831,000	0
2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)	a	Lautra	0	0	0	0	0	0

3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSP Sorong (Jenis)	a	Data dan Informasi Konservasi jenis Ikan	500,000,000	346,329,000	0	153,671,000	346,329,000	0
4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSP Sorong (Nilai)			0	0	0	0	0	0
5	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau - pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSP Sorong (Dokumen)	a	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar)	300,000,000	156,630,000	0	143,370,000	156,630,000	0
6	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSP Sorong (Dokumen)	a	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut	359,874,000	229,936,000	0	129,938,000	229,936,000	0
		b	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut	465,126,000	150,000,000	0	315,126,000	150,000,000	0
7	Nilai PM SAKIP Lingkup LPSP Sorong (Nilai)	a	Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	83,632,000	14,573,000	11,044,171	69,059,000	3,528,829	75.79

8	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup LPSPL Sorong (Nilai)			113,660,000	19,857,000	19,686,500	93,803,000	170,500	100
		a	Layanan BMN	10,904,000	9,104,000	9,103,650	1,800,000	350	100
		b	Layanan Perencanaaan Program dan Anggaran	79,952,000	170,000	0	79,782,000	170,000	0
		c	Layanan Manajemen Keuangan	22,804,000	10,583,000	10,582,850	12,221,000	150	100
9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)								
		a	Layanan Perencanaaan Program dan Anggaran						
10	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)								
		a	Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan						
11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)			84,812,000		0	84,632,000	180	0
		a	Layanan Manajemen SDM Program dan Anggaran	84,812,000	180000	0	84,632,000	180	0
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK di LPSPL Sorong (Nilai)			7,059,000	208,000	-	6,851,000	208	-
		a	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	7,059,000	208,000	-	6,851,000	208	-
15	Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)			325,392,000	219,321,000	58,951,064	106,071,000	160,369,936	26.88
		a	Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan	325,392,000	219,321,000	58,951,064	106,071,000	160,369,936	26.88
16	Persentase rencana umum pengadaan		-	334,125,000	334,125,000	-	-	334,125,000	-

	PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%) (PLN)	a	Penjangkauan dan pelibatan Pemangku Kepentingan	334,125,000	334,125,000	0	0	334,125,000	0
17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)			14,984,000	170,000	-	14,814,000	170,000	-
		a	Layanan Kehumasan	14,984,000	170000	0	14,814,000	170000	0
	Non IKU	a	Belanja Pegawai	5,400,000,000	5,400,000,000	2,329,556,684		3,070,443,316	43.16
		b	Belanja Operasional perkantoran	2,421,000,000	1,603,334,000	881,220,141	817,666,000	722,113,859	54.96

Tabel 3.24 Daftar kegiatan dan pagu anggaran

No	Kode KRO	Uraian	Pagu	Pagu Blokir	Pagu Efektif	Sumber Anggaran		
						RM	PNBP	PLN
1	2362	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (PNBP)	500,000,000	153,671,000	346,329,000		500,000,000	
		Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan (PLN)	30,151,670,000	7,684,714,000	22,466,956,000			30,151,670,000
2	2365	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300,000,000	143,370,000	156,630,000		300,000,000	
3	2366	Penataan Ruang Laut	825,000,000	445,064,000	379,936,000		825,000,000	
4	2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	8,450,539,000	1,192,896,000	7,257,643,000	8,450,539,000		
TOTAL			40,227,209,000	9,619,715,000	30,607,494,000	8,450,539,000	1,625,000,000	30,151,670,000

3.9. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Unit Kerja Lainnya

Membandingkan capaian kinerja LPSPL Sorong dengan capaian kinerja Unit Kerja lain bertujuan untuk melihat apakah capaian LPSPL Sorong sudah maksimal atau dapat ditingkatkan lagi dengan mengacu dari capaian unit kerja lainnya.

Tabel 3.25 Membandingkan capaian kinerja LPSP Sorong dengan Unit Pelaksana Teknis lain pada triwulan I tahun 2025.

No	Indikator Kinerja	LPSP Sorong TW II			LPSP Serang TW II			BPSP Makassar TW II		
		Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku
1	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSP Sorong (Provinsi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSP Sorong (Orang)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSP Sorong (Jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Nilai Minimum Kinerja Pelayanan Perizinan Pemanfaatan berkelanjutan Biota Perairan di Wilayah Kerja LPSP Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Indikator Kinerja	LPSPL Sorong TW II			LPSPL Serang TW II			BPSPL Makassar TW II		
		Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku
5	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau - pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	85	83,69	98,69%	85	98,88	116,33%	85	92,51	108,84%
9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
11	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup	78	84,62	108,49%	78	85,53	109,65%	78	90,18	115,62%

No	Indikator Kinerja	LPSPL Sorong TW II			LPSPL Serang TW II			BPSPL Makassar TW II		
		Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku	Target	Capaian	Kinerjaku
	LPSPL Sorong (Indeks)									
12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)	95	100	105,26%	95	100	105,26%	95	100	105,26%
13	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPSPL Sorong (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)	76	100	120%	76	100	120%	76	100	120%
17	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

 : Capaian lebih rendah
 : Capaian sama

Dari tabel diatas diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan target antara LPSPL Sorong, LPSPL Serang dan BPSPL Makassar. Sebanyak tiga indikator capaiannya sama antara ketiga UPT tersebut pada triwulan II tahun 2025 yaitu :

- a. Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen), LPSPL Sorong dan LPSPL Serang sama sama menargetkan 2 dokumen pada triwulan II tahun 2025 dan capaiannya sebesar 2 dokumen atau tercapai 100%. LPSPL Sorong, LPSPL Serang dan BPSPL Makassar telah menyelesaikan dokumen Laporan SPIP Triwulan IV tahun 2024 dan Laporan SPIP Triwulan I tahun 2025 pada triwulan II tahun 2025.
- b. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%), LPSPL Sorong , LPSPL Serang dan BPSPL Makassar memiliki target triwulan II tahun 2025 sebesar 95 dan capaiannya sebesar 100 atau tercapai 105,26%. Hal ini sesuai dengan surat penyampaian surat penyampaian Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan nomor B.1131/DJPK.1/TU.210/VII/2025 tentang Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Triwulan II Tahun 2025
- c. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%), LPSPL Sorong dan LPSPL Serang memiliki target triwulan I tahun 2025 sebesar 76% dan capaiannya sebesar 100% atau tercapai 120% dari nilai target. Hal ini sesuai dengan nota dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B.1144/DJPK.1/TU.210/VII/2025 Tanggal 14 Juli 2025 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Ditjen PKRL yang Diumumkan pada SIRUP Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025.

Indikator Kinerja yang capaiannya berbeda antara LPSPL Sorong, LPSPL Sorong dan BPSPL Makassar adalah

- a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai). LPSPL Sorong memperoleh nilai 83,69 dengan persentase capaian sebesar 98,69%, LPSPL Serang mendapat nilai 98,88 dengan persentase capaian 116,33% dari target dan BPSPL Makassar sebesar 92,51 dengan persentase capaian 108,84% .

Diantara UPT yang dibandingkan LPSPL Serang memperoleh nilai tertinggi sedangkan LPSPL Sorong mendapat nilai yang terendah dari ketiga UPT tersebut.

Tabel 3.26 Rincian Nilai IKPA LPSPL Sorong

Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pengelolaan Anggaran				Capaian Output	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Total/Konversi Bobot)
		Revisi Halaman III DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
BPSPL Makassar	Nilai	100	88.29	71.46	100	100	99.75	100	92.51	100%	0	92.51
	Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
	Nilai Akhir	10	13.24	14.29	10	10	9.97	25				
	Nilai Aspek	94.15		92.8				100				
LPSPL Serang	Nilai	100	92.6	100	100	100	99.85	100	98.88	100%	0	98.88
	Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
	Nilai Akhir	10	13.89	20	10	10	9.99	25				
	Nilai Aspek	96.3		99.96				100				
LPSPL Sorong	Nilai	100	67.73	63.17	0	0	93.18	100	67.11	80%	0	83.89
	Bobot	10	15	20	0	0	10	25				
	Nilai Akhir	10	10.16	12.63	0	0	9.32	25				
	Nilai Aspek	83.87		78.17				100				

Rendahnya nilai LPSPL Sorong dibandingkan dengan ketiga UPT tersebut disebabkan oleh LPSPL Sorong disebabkan karena rendahnya perolehan nilai dari sub komponen deviasi halaman III DIPA yang hanya memperoleh nilai 67,73. Deviasai halaman III DIPA LPSPL Sorong disebabkan karena adanya penundanaan pelaksanaan kegiatan Lautra sesuai dengan surat penyampaian Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 Tentang Pelaksanaan kegiatan Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Oceans for Prosperity Project hingga Juni 2025. Selain itu terdapat blokir anggaran PNBPN yang baru dibuka pada Juni 2025 namun tidak disertai dengan MP PNBPN hingga akhir triwulan II.

- b. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks) target LPSPL Sorong, LPSPL Serang dan BPSPL Makassar adalah sebesar 78. Nilai yang diperoleh oleh LPSPL Sorong sebesar 84,62 dengan persentase capaian terhadap target sebesar 108,49%, LPSPL Serang sebesar 85,53 dengan persentase capaian terhadap target sebesar 109,65% dan BPSPL Makassar memiliki nilai 90,18 dengan persentase

capaian terhadap target sebesar 115,62%. Nilai IP ASN LPSPL Sorong lebih rendah dibandingkan dengan LPSPL Serang dan BPSPL Makassar disebabkan oleh penilaian predikat kinerja pegawai, dimana hanya 1 orang pegawai LPSPL Sorong yang mendapatkan kategori sangat baik sedangkan di LPSPL Serang sebanyak 26 orang dan BPSPL Makassar sebanyak 30 orang.

BAB

4 PENUTUP

Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) LPSPL Sorong pada Triwulan II Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan dalam mencapai Capaian Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. LPSPL Sorong mempunyai 3 indikator kinerja yang capaiannya melebihi target kinerja diantaranya:
 - a. IK 11 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong tercapai 84,62 dari target 78 dengan persentase kinerjaku 108,49%;
 - b. IK 12 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong tercapai 100% dari target 95% dengan persentase kinerjaku 105,26%
 - c. IK 16 Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%) tercapai 100% dari target 76% dengan persentase kinerjaku 120%
2. LPSPL Sorong mempunyai 1 indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target kinerja yaitu IK 10 Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen) tercapai 2 dokumen dari target 2 dokumen dengan persentase capaian 100%,
3. LPSPL Sorong mempunyai 1 indikator kinerja yang capaiannya kurang dari target kinerja yaitu IK 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong tercapai 83,69 dari target 85 atau 98,69%.
4. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Mandatory LPSPL Sorong Triwulan I Tahun 2025 adalah **106,96** (kategori hijau=baik).

Rekomendasi

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait kinerja Triwulan II Tahun 2025, yaitu:

1. Terdapat deviasi halaman III DIPA yang tinggi oleh karena itu disarankan agar dapat melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan melakukan revisi administrasi penyesuaian Halaman III DIPA.
2. Perlu dilakukan pemantauan kinerja pelaksanaan
3. Pada Triwulan II telah terdapat buka blokir anggaran yang bersumber dari PNPB dan sudah terdapat izin penggunaan anggaran Lautra oleh sebab itu disarankan agar LPSPL Sorong dapat segera melaksanakan kegiatan dengan berpatokan rencana kegiatan dan RPD.

Tindakanlanjutan Atas Rekomendasi Periode Sebelumnya

Terdapat rekomendasi yang telah tindak lanjuti untuk perbaikan kinerja LPSPL Sorong pada tahun 2024 diantaranya :

Tabel 3.27 Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Data Dukung
Triwulan I Tahun 2025			
1.	Terdapat blokir pada DIPA LPSPL Sorong yang akan dibuka oleh karena itu disarankan agar LPSPL Sorong melakukan revisi DIPA setelah blokir terbuka agar dapat melaksanakan kegiatan pendukung Indikator Kinerja	Telah dilakukan revisi DIPA untuk pendukung pembukaan blokir	https://bit.ly/dadukLKJ2025
2.	Pada Triwulan II akan ada buka blokir anggaran yang bersumber dari PNPB oleh karena itu disarankan agar LPSPL Sorong berkoordinasi dengan Sesditjen DJPK terkait MP PNPB untuk memastikan waktu	LPSPL Sorong telah berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal Pengelolaan Kelautan terkait MP PNPB	https://bit.ly/dadukLKJ2025

	anggaran dapat digunakan sehingga dukungan anggaran terhadap pelaksanaan Indikator Kinerja dapat optimal.		
3.	Terdapat Indikator Kinerja yang menggunakan sumber dana Pinjaman Luar Negeri, untuk mengantisipasi sumber dana tersebut masih belum dapat digunakan disarankan agar LPSPL Sorong dapat berkoordinasi dengan mitra kerja konservasi dan Pemerintah Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan kegiatan dan kegiatan dapat dilakukan bersama.	LPSPL Sorong telah berkoordinasi dengan mitra kerja kawasan konservasi dan Satuan Unit Organisasi Pengelola Kawasan Konservasi Daerah untuk mendapatkan dukungan pelaksanaan kegiatan	https://bit.ly/dadukLKJ2025

LAMPIRAN

Lampiran I. Perjanjian Kinerja LPSPL Sorong TA 2025



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAR www.kkp.go.id SUREL sespridijenprti@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (LPSPL)
SORONG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hendrik Sombo**

Jabatan : Plt. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Plt. Kepala Loka Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut Sorong

Hendrik Sombo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT (LPSPL)
SORONG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Terselenggaranya penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong	1.	Daerah yang difasilitasi penilaian evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah di wilayah kerja LPSPL Sorong (Provinsi)	3
2.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong	2.	Masyarakat yang ditingkatkan kapasitas dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi di wilayah kerja LPSPL Sorong (Orang)	20
3.	Terkelolanya pemanfaatan Keanekaragaman Hayati perairan yang dilindungi dan/atau Appendiks CITES secara berkelanjutan di wilayah kerja LPSPL Sorong	3.	Jenis keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara berkelanjutan di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Jenis)	3
4.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	4.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di wilayah kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	2
5.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan pulau - pulau kecil di Wilayah Kerja LPSPL Sorong	5.	Dokumen identifikasi pemanfaatan pulau - pulau kecil yang disusun di Wilayah Kerja LPSPL Sorong (Dokumen)	1
6.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup LPSPL Sorong	6.	Nilai PM SAKIP Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	88
		7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DJPKRL Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	71,5
		9.	Laporan SPIP yang disusun lingkup LPSPL Sorong (Dokumen)	4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
		10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup LPSPL Sorong (Indeks)	87
		11. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup LPSPL Sorong (%)	95
		12. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup LPSPL Sorong (%)	100
		13. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	75
		14. Nilai pengawasan kearsipan internal Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	80
		15. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup LPSPL Sorong (%)	76
		16. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Lingkup LPSPL Sorong (Nilai)	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	30.651.670.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	300.000.000
3.	Perencanaan Ruang Laut	825.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	8.450.539.000
Total Anggaran Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (LPSPL) Sorong Tahun 2025		40.227.209.000

Jakarta, . Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Plh. Kepala Loka Pengelolaan Sumber
Daya Pesisir dan Laut Sorong


Hendrik Sombo

Lampiran II. Sertifikat ISO 9001:2015



Lampiran III. Sertifikat ISO 37001:2016



Certificate of Registration

Registration No. : QAIC / ID / 11130 - E
QAI Indonesia Certification
Hereby grants to:

LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SORONG
Jl. KPR PDAM KM. 10, Klawuyuk, Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya

(hereinafter called the Registered Institution) the right to be listed in the Directory of Registered Institution in respect of the services listed below. These services shall be offered by the Registered Institution at or from only the address given below in accordance with the Anti-bribery Management System in compliance with

ISO 37001:2016

Approved Scope to which this Certificate refers:
Provision of Public Administration in Monitoring Trading Traffic of Endangered and Protected Fish

(Further clarification regarding the Scope of this Certificate and the applicability of ISO 37001:2016 requirement may be obtained by consulting the organization)
For and on behalf of QAI Indonesia



Ir. Joko Nursapto, MEng.Sc-RLA

Certificate Issue Date : 19 July 2024 - Re-assessment Date : 19 July 2025
Date of Initial Registration : 19 July 2024 - Certificate Expiry Date : 19 July 2027
This Certificate of Registration is granted subject to the Regulations approved by the Governing Board. This certificate has a three-year certification cycle and must be renewed every year before the re-assessment date.

QAI INDONESIA
CERTIFICATION
Address: Jl. Surabaya No.11, Menteng,
Jakarta, 10310
Telp: 021 - 21230866
Email: admin@qai.co.id
Website QAI: www.qai.co.id
Website Accreditor: www.ascb.com







Lampiran IV. Piagam Penghargaan LPSPL Sorong Tahun 2025



Lampiran V. Realisasi Anggaran Per RO Triwulan II Tahun 2025

032.07.47744 0	DITJEN PRL-LOKA PSPL SORONG	VOLUME	KELUARA N	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
				40,227,209,00 0	3,300,458,5 60	36,462,002,4 40
032.07.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup			30,651,670,00 0	-	30,651,670,0 00
2362	Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut			30,651,670,00 0	-	30,651,670,0 00
2362.QMA	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan	1	Dokumen	500,000,000	-	500,000,000
2362.QMA.00 2	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan			500,000,000	-	500,000,000
051	Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan			500,000,000	-	500,000,000
A	Verifikasi Lapang Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan			29,092,000		29,092,000
B	Operasional Pemanfaatan Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan			124,579,000		124,579,000
C	Operasional Pemanfaatan Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan			303,979,000		303,979,000
D	Verifikasi Lapang Data dan Informasi Konservasi Biota Perairan			42,350,000		42,350,000
2362.REA	Konservasi Kawasan/rehabilitasi Ekosistem	814000	Hektar	30,151,670,00 0	-	30,151,670,0 00
2362.REA.004	Oceans For Prosperity Project - Lautra			30,151,670,00 0	-	30,151,670,0 00
051	Penyusunan Kesepakatan Bersama			30,151,670,00 0	-	30,151,670,0 00
AA	Surveillance Patrol Inside-Raja Ampat			3,223,792,000		3,223,792,00 0
BA	Bantuan Teknis Inventarisasi Spesies dan Penyusunan Rencana Zonasi			6,088,180,000		6,088,180,00 0
CA	Monitoring Biofisik, Sosial Ekonomi dan Budaya di KKD Mare-Maluku Utara			1,534,809,000		1,534,809,00 0
EA	Penjangkauan dan Pelibatan Pemangku Kepentingan 2025			1,725,994,000		1,725,994,00 0
FA	Reviu dan Update Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (Daerah)-Kepulauan Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya			3,223,486,000		3,223,486,00 0
GA	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (Daerah), Pulau Mare Provinsi Maluku Utara			243,838,000		243,838,000

	GB	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (Daerah), (Mare, Kei Kecil dan Babar)			4,046,120,000		4,046,120,000
	GC	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (Daerah), (Kei Kecil dan Maluku)			574,939,000		574,939,000
	GD	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi (Daerah), (Babar Provinsi Maluku)			658,232,000		658,232,000
	HA	Penyusunan Master Plan Penguatan Kawasan Konservasi Daerah Wilayah Kerja LPSPL Sorong			5,758,618,000		5,758,618,000
	IA	Penyusunan DED Kawasan Konservasi (Daerah)			3,073,662,000		3,073,662,000
032.07.HB		Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			1,125,000,000	-	745,064,000
2365		Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			300,000,000	-	300,000,000
2365.PBW		Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan[Base Line]	1		300,000,000	-	300,000,000
2363.PBW.001		Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	1	Rekomen dasi Kebijakan	300,000,000	-	300,000,000
051		Rekomendasi Pemafaatn Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang disusun (PNBP)			300,000,000	-	300,000,000
A		Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil			143,370,000		143,370,000
	B	Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil			156,630,000		156,630,000
2366		Penataan Ruang Laut			825,000,000	-	445,064,000
2366.PBT		Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan[Base Line]	1	Rekomen dasi Kebijakan, Kajian, Materi Teknis, Dokumen	825,000,000	-	445,064,000
2366.PBT.009		Rekomendasi Kebijakan Verifikasi Kesesuain Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut yang Beresiko Rendah	1	Rekomen dasi Kebijakan	825,000,000	-	445,064,000
052		Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut			359,874,000	-	129,938,000
A		Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut			129,938,000		129,938,000
	B	Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut			229,936,000		

053	Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut			465,126,000	-	315,126,000
A	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			139,438,000		139,438,000
B	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut			175,688,000		175,688,000
C	Sosialisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang			80,000,000		80,000,000
D	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut			70,000,000		70,000,000
032.07.WA	Program Dukungan Manajemen			8,450,539,000	3,300,458,560	5,065,268,440
2367	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut			8,450,539,000	3,300,458,560	5,065,268,440
2367.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	6	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	8,179,339,000	3,278,831,539	4,900,507,461
2367.EBA.956	Layanan BMN	2	Layanan	10,904,000	9,103,650	1,800,350
051	Layanan BMN			10,904,000	9,103,650	1,800,350
A	Rekonsiliasi SAI - SIMAK BMN			10,904,000	9,103,650	1,800,350
2367.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1	Layanan	14,984,000	-	14,984,000
051	Layanan Kehumasan			14,984,000	-	14,984,000
A	Layanan Kehumasan			14,984,000		14,984,000
2367.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	7,059,000	-	7,059,000
053	Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP			7,059,000	-	7,059,000
A	Zona Integritas WBK/WBBM LPSPL Sorong			7,059,000		7,059,000
2367.EBA.962	Layanan Umum	1	Layanan	325,392,000	58,951,064	266,440,936
051	Layanan Persuratan, Tata Usaha dan Kearsipan			325,392,000	58,951,064	266,440,936
A	Layanan Tata Usaha			325,392,000	58,951,064	266,440,936
2367.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	Layanan	7,821,000,000	3,210,776,825	4,610,223,175

001	Gaji dan Tunjangan			5,400,000,000	2,329,556,684	3,070,443,316
A	Pembayaran gaji dan tunjangan			5,400,000,000	2,329,556,684	3,070,443,316
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2,421,000,000	881,220,141	1,539,779,859
A	Operasional Kantor			1,889,946,000	791,201,323	1,098,744,677
B	Pemeliharaan Kantor			531,054,000	90,018,818	441,035,182
2362.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal			84,812,000	21,627,021	63,184,979
2367.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	31	Orang	84,812,000	21,627,021	63,184,979
051	Layanan Manajemen SDM			84,812,000	21,627,021	63,184,979
A	Layan Pengelolaan Kinerja Pegawai			84,812,000	21,627,021	63,184,979
2367.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]	2	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	186,388,000	21,627,021	164,760,979
2367.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	Dokumen	79,952,000	-	79,952,000
051	Layanan Perencanaan Program dan Anggaran			79,952,000	-	79,952,000
A	Perencanaan Program dan Anggaran			79,952,000		79,952,000
2367.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	Dokumen	83,632,000	11,044,171	72,587,829
051	Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan			83,632,000	11,044,171	72,587,829
A	Laporan Program dan Kegiatan lingkup DJPRL			83,632,000	11,044,171	72,587,829
2367.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan		1	22,804,000	10,582,850	12,221,150
051	Layanan Manajemen Keuangan			22,804,000	10,582,850	12,221,150
A	Manajemen dan Pelaporan Keuangan			22,804,000	10,582,850	12,221,150